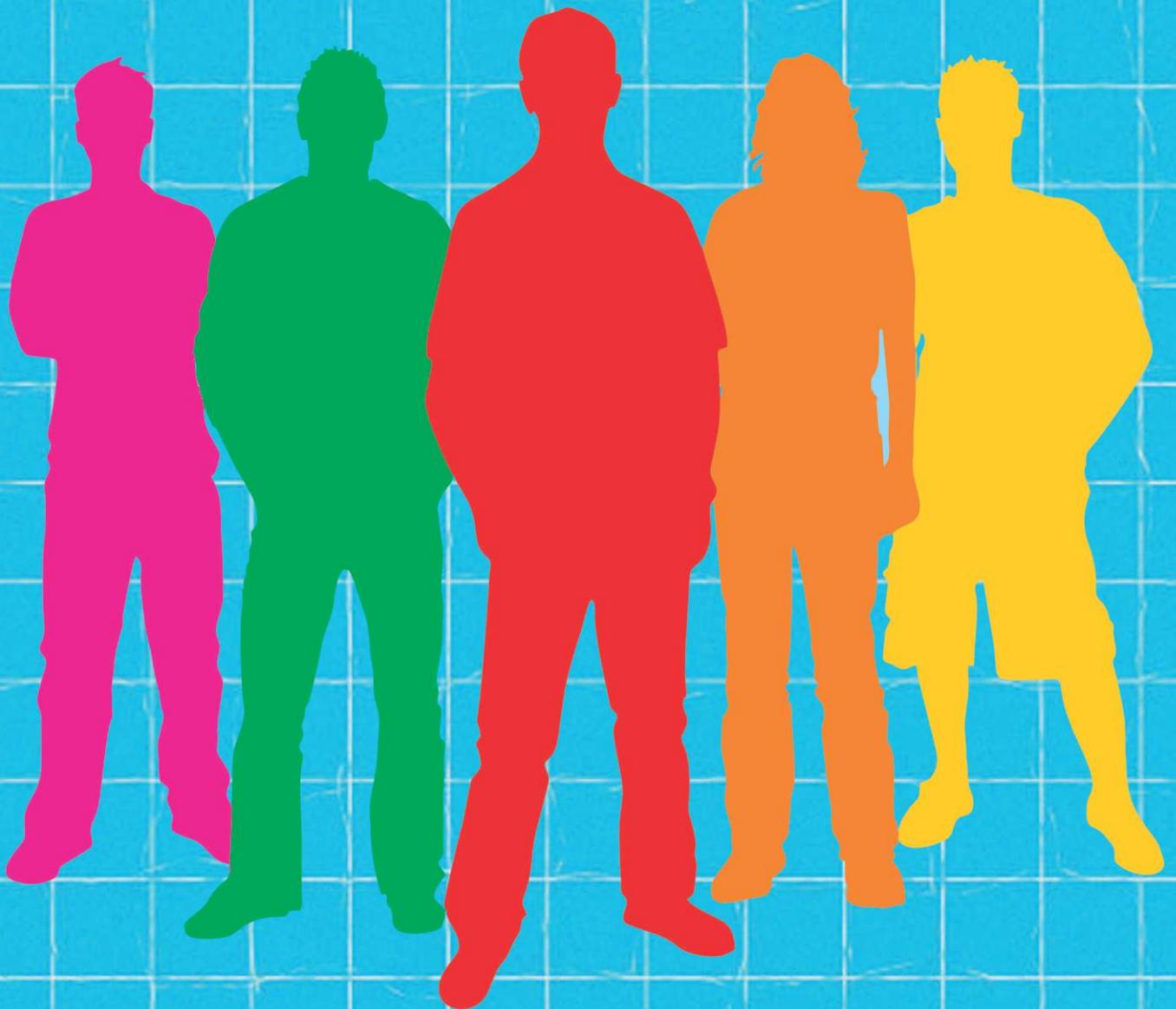


POLITIK PEMILIH MUDA

PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA DI PEKANBARU, JAKARTA, CIREBON, PALU, DAN JAYAPURA



Tim Riset

Arie Putra
Christina Dwi Susanti
Indah Yusari
Ingrid Silitonga
Muhamad Hisbullah Amrie

Supervisor

Daniel Dhakidae

Diterbitkan oleh



Didukung oleh:



sekitarkita.com
manusia, budaya dan lingkungan



Daftar Isi

Pengantar	I
Pendahuluan	1
Pertanyaan Penelitian	5
Tujuan Penelitian	5
Hipotesis Utama	6
Metodelogi Penelitian	7
Hasil dan Pembahasan	9
Produksi Budaya HAM dan Demokrasi di Sekolah dan Kampus; Rendahnya Keterpaparan HAM di Sekolah dan Kampus	9
Minimnya Metode Penyampain Materi HAM di Sekolah dan Universitas	15
HAM Bukan Sekadar Bacaan	17
Pendidikan Berbasis Hak	19
Partisipasi Politik Anak Muda dan Hak Asasi Manusia	23
Partisipasi Politik dan Hak Asasi Manusia	30
Anak Muda: Organisasi, Keluarga, dan Partisipasi Politik	35
Organisasi dan Partisipasi Politik Anak Muda	39
Ikatan Keluarga	42
Diskusi Politik dalam Keluarga	44
Hubungan Ikatan Keluarga terhadap Partisipasi Politik	46
Demokrasi Media Dan Media Demokrasi	48
Media Sebagai Ruang Politik	50
Produk Media untuk Anak Muda	52
Anak Muda Yang Berjarak Dengan Media untuk kepentingan Politik	54
Kesimpulan	58
Pengaruh Keterpaparan Pengetahuan HAM Sebagai Yang Terkuat	58
Keterbatasan Penelitian	61
Rekomendasi	62
Referensi	63

Daftar Tabel

Tabel 1	Distribusi Responden terhadap Keterpaparan HAM dan Partisipasi Politik	10
Tabel 2	Distribusi Responden Menurut Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Keterpaparan HAM di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	32
Tabel 3	Distribusi Responden Menurut Keaktifan dalam Organisasi dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	39
Tabel 4	Distribusi Responden Menurut Intensitas Diskusi dalam Keluarga Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	45
Tabel 5	Distribusi Responden Menurut Ikatan Keluarga dan Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	47
Tabel 6	Distribusi Responden Menurut Keterpaparan Media dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, dan Jayapura	50
Tabel 7	Analisis Hubungan antara Keterpaparan Media terhadap Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	51
Tabel 8	Distribusi Responden Menurut Akses Konten Politik di Televisi terhadap Kegiatan memberikan Saran/Kritik pada Kebijakan Pemerintah	55
Tabel 9	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Keterpaparan Media, dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	57
Tabel 10	Distribusi Responden Menurut Status Sosial Ekonomi, Keterpaparan Media, dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	58

Daftar Diagram

Diagram 1	Distribusi Responden terhadap Keterpaparan HAM melalui Mata Pelajaran	11
Diagram 2	Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Siswi Hamil dikeluarkan oleh Sekolah Merupakan Pelanggaran HAM	12
Diagram 3	Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Bullying Merupakan Pelanggaran HAM	13
Diagram 4	Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Merokok merupakan pelanggaran HAM	13
Diagram 5	Distribusi Pelaporan Kasus HAM 14	14
Diagram 6	Distribusi Metode penyampaian Materi Mengenai HAM	16
Diagram 7	Distribusi Responden yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	24
Diagram 8	Distribusi Responden Menurut Partisipasi Politik Anak Muda di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	25
Diagram 9	Distribusi Responden yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI) di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	26
Diagram 10	Distribusi Responden yang Memberikan Saran atau Kritik Tentang Suatu Kebijakan di Sekolah/Kampus di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	27
Diagram 11	Distribusi Responden Mengenai Kesempatan untuk Memberikan Kritik dan Saran di Sekolah/Kampus di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	27
Diagram 12	Distribusi Responden yang Mendapatkan Informasi bahwa Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI) di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura	31
Diagram 13	Distribusi Responden Menurut Keaktifan dalam Berorganisasi Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	37
Diagram 14	Distribusi Responden Menurut Ikatan Keluarga Anak Muda di Pekanbaru Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	43
Diagram 15	Jawaban Pertanyaan “Seberapa Penting Peran Keluarga dalam Kehidupan Kamu?”	43
Diagram 16	Distribusi Responden Menurut Penggunaan Media Sosial Untuk Melakukan Kritik Kepada Kebijakan Pemerintah di Palu.	51
Diagram 17	Distribusi Responden Menurut Penggunaan Media Sebagai Sumber Informasi Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura	53

Kata Pengantar

Anak muda dan partisipasi politik, mengapa keduanya menjadi penting? Pertanyaan inilah yang mendasari Demos dan Pamflet merancang penelitian ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, terdapat 40,7 juta jiwa penduduk Indonesia berusia 15 – 24 tahun. Data ini memperlihatkan potensi pembangunan manusia terletak pada anak muda. Di satu sisi memperlihatkan potensi, di sisi lain merupakan tantangan. Pertanyaan sederhananya saja, pertama apakah orientasi kebijakan pemerintah mengarah pada pembangunan anak muda. Kedua, apakah anak muda memiliki kesadaran untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan yang menyentuh kepentingan mereka. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut lebih lanjut maka berdasarkan konsep partisipasi politik ini kemudian diturunkan.

Penelitian yang berlangsung menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 ini melibatkan 16 (enam belas) peneliti muda tersebar di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura yang menjadi wilayah penelitian. Peneliti – peneliti muda ini juga terlibat langsung dalam survei, *Focus Groups Discussion* (FGD) serta wawancara mendalam dengan informan ahli bersama peneliti Demos dan Pamflet. Sementara dalam hal substansi, Demos dan Pamflet di bimbing oleh Dr Daniel Dhakidae sebagai Supervisor Riset.

Dari proses penyusunan desain riset hingga diseminasi yang dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2014 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu Demos dan Pamflet mengucapkan banyak terima kasih kepada para peneliti lokal dari tiga organisasi yaitu Sofi Institute, Youth Forum Papua (YFP), Sikukeluang, dan individu yaitu Masrio Bima Andika, Amri Yuharozza, Yenovita, Prisilia Resolute (peneliti Jakarta), Muhammad Achil Darwis dan Jefrianto (peneliti Cirebon). Juga kepada Afra Suci Ramadhan, Aquino Hayunta, Unity, SekitarKita, serta para peneliti Pamflet. Penghargaan setinggi – tingginya diberikan kepada para peneliti utama yaitu Arie Putra (Koordinator), Christina Dwi Susanti, Indah Yusari, Muhamad Hisbullah Amrie, Inggrid Silitonga, tim peneliti yang telah berusaha maksimal dalam mengerjakan penelitian ini yang dapat menghadirkan laporan penelitian Politik Pemilih Muda: Faktor – faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura ini kepada pembaca.

Kami haturkan terima kasih kepada Tunggal Pawestri dan HIVOS yang memberikan dukungan kerjasama kepada Demos, Pamflet, Unity dan sekitarKita dalam Program Youth Rights Now! besar harapan kami agar hasil penelitian ini dapat didiskusikan di kalangan anak muda, digunakan sebagai rencana advokasi organisasi anak muda dalam rangka mempengaruhi ruang publik dan kebijakan publik.

Kami sadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik saran sangat kami harapkan guna perbaikan penelitian kami di masa yang akan datang. Selamat membaca!

Perkumpulan Demos
November 2014

ABSTRAK

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara, termasuk di dalamnya anak muda berusia 15-30 tahun, dengan maksud mempengaruhi tindakan pemerintah, baik secara langsung dengan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan publik, maupun secara tidak langsung dengan memberikan suara pada pemilihan pemangku kebijakan. Tidak terbatas hanya dalam ranah pemilu saja, partisipasi politik seseorang bisa dalam beragam bentuk; mencalonkan diri menjadi ketua organisasi, memberikan saran/kritik terhadap suatu kebijakan, demonstrasi, membuat petisi, atau *civil disobedience*. Tingkat partisipasi politik anak muda tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaparan terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM), keterpaparan media, ikatan keluarga, dan keaktifan dalam berorganisasi. Penelitian ini menggunakan *mixed method research*, yaitu pengumpulan data kuantitatif dengan kuesioner dan pengumpulan data kualitatif dengan diskusi terarah (*Focus Group Discussion*) serta wawancara mendalam terhadap tokoh politik, agama, pendidikan, dan aktivis di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura. Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterpaparan pengetahuan HAM, keterpaparan media, dan keaktifan organisasi terhadap partisipasi politik anak muda ($p \text{ value} < 0.05$), sedangkan tidak ditemukan hubungan yang berarti antara ikatan keluarga terhadap partisipasi politik anak muda ($p \text{ value} > 0.05$). Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap partisipasi politik anak muda di 5 kota tersebut adalah keterpaparan anak muda terhadap pengetahuan HAM. Anak muda yang terpapar dengan pengetahuan terkait memiliki kecenderungan untuk memiliki partisipasi politik yang lebih aktif dibanding anak muda yang tidak terpapar pengetahuan sejenis. Pengetahuan ini memicu anak muda untuk membela kebijakan publik (*public virtues*) dan melakukan partisipasi politik secara positif dengan membela kepentingan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pendidikan dan partisipasi politik merupakan fenomena dunia, bahkan jauh melintasi waktu fenomena ini terekam jelas dalam jejak sejarah bangsa-bangsa. Hampir semua embrio kekuatan politik dunia dimulai dari sebuah institusi pendidikan. Sehingga, semua orang yang memiliki latar belakang pendidikan (yang cukup tinggi) di seluruh suku bangsa memiliki posisi tersendiri di dalam struktur masyarakatnya. Dengan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah dan orang-orang tersebut, dengan didukung oleh nilai kemanusiaan, partisipasi politik mereka tentunya begitu signifikan dalam mendukung perubahan sosial.

Dalam studinya mengenai masyarakat tradisional Korea Selatan pada tahun 1876-1910 saat dinasti Yi masih berkuasa, James Palais (1976) memperlihatkan beberapa tesis utama yang menunjukkan akar-akar dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat

Korea Selatan pada hari ini. Studi ini memperlihatkan struktur masyarakat Korea Selatan yang begitu kaku pada pemerintahan dinasti ini, mulai dari kelas bangsawan, pekerja kerajaan, budak, penghibur, dan intelektual memiliki posisi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hal yang sangat menarik untuk disorot dalam artikel ini adalah ketika Palais juga menjelaskan bagaimana posisi institusi pendidikan di dalam masyarakat tradisional Korea Selatan. Sekolah memiliki kewajiban melahirkan intelektual-intelektual konfusian. Sehingga, sekolah harus merancang kurikulumnya untuk melahirkan konfusian-konfusian muda yang memiliki kewajiban untuk mengkritik berbagai macam kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. Negara selalu mendorong sekolah-sekolah ini untuk tetap berkembang, walaupun kewajiban dari intelektual konfusian ini tidak dilindungi oleh perangkat legal. Sehingga, hukuman yang berat dari negara selalu menjadi resiko yang selalu sudah siap untuk mereka tanggung. (Palais, 1976)

Selain studi Palais mengenai orang-orang Korea Selatan masa lalu, Steven Finkel (2002) melalui studinya yang dilakukan di Republik Dominika dan Republik Afrika Selatan menelaah program-program pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di dua negara tersebut. Finkel melihat pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap perilaku siswa sekolah dasar dan sekolah menengah dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuh program yang sudah berjalan sekitar tiga tahun ini merupakan sebuah format baru dari pendidikan kewarganegaraan di dua negara demokrasi baru ini. Tujuh program tersebut terdiri dari kurikulum dan modul mata ajar yang mengandung pembahasan mengenai nilai dalam politik, kesetaraan gender, kepemimpinan, dan hak asasi manusia serta pelatihan-pelatihan untuk mendorong partisipasi politik siswa-siswa sekolah. Kesimpulan yang diperlihatkan studi evaluatif yang dilakukan lewat metode survey ini adalah terdapat pengaruh empat dari tujuh program tersebut yang sangat kuat pada masyarakat di dua negara ini. Kegagalan tiga program lainnya disinyalir karena hambatan teknis, seperti tidak menariknya promosi kegiatan sehingga membuat siswa-siswa yang diundang banyak yang tidak datang.

Dengan mempertimbangkan pola-pola yang terjadi di berbagai negara, studi yang akan dilakukan ini berfokus kepada partisipasi politik anak muda serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik anak muda ini adalah keterpaparan anak muda terhadap pengetahuan HAM, ikatan keluarga, keterpaparan media, dan keaktifan berorganisasi. Hal ini juga didukung dengan keadaan Indonesia pada periode awal tahun 2014 ini yang akan segera menghadapi pemilu di bulan

Juli mendatang. Alasan pendukung lainnya, jumlah pemilih muda (dalam usia yang dikategorikan sebagai pemuda menurut undang-undang kepemudaan) merupakan kelompok demografis potensial dalam pemilu. Pemilih muda memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran pemilu karena belum ada pemahaman konsep yang memadai mengenai pertarungan kepentingan di dalam Pemilu. Hal ini diperparah dengan kementrian pendidikan, sekolah, dan kurikulum yang ada belum memiliki sebuah konsep dan program yang baku untuk menanggulangi minimnya pengetahuan pemilih muda ini terhadap pemilu, yang menjadi salah satu dimensi untuk menilai partisipasi politik mereka. Dan alasan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang akan menuntun mereka terhadap kebijakan publik.

Pemahaman-pemahaman mengenai demokrasi dan hak asasi manusia merupakan sebuah bekal yang sangat berguna bagi kelompok pemilih muda dalam menghadapi pemilihan umum yang segera diadakan. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tersebut juga merupakan sebuah dimensi dari hak asasi manusia, tak terkecuali pemilih muda di Indonesia. Namun jika hal ini tidak terpenuhi, para pengambil keputusan selalu menganggap sebagai sesuatu yang lumrah dengan berbagai pembenaran, seperti pemerataan belum tercapai karena Indonesia memiliki ruang geografis yang begitu luas. Selain itu, jawaban yang sama juga disampaikan ketika institusi-institusi pendidikan dari seluruh penjuru Indonesia tidak mampu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep ini. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh anak muda. Sehingga haruslah anak muda mendapatkan akses dan kesempatan yang mudah untuk memperoleh pengetahuan mengenai demokrasi dan HAM. Keterpaparan pengetahuan mengenai demokrasi dan HAM ini bukan semata hanya untuk menghadapi Pemilihan Umum namun juga bagi segala sendi kehidupan anak muda sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

Banyak persoalan-persoalan demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang bersentuhan langsung dengan institusi pendidikan di Indonesia, mulai dari kekerasan fisik terhadap pelajar hingga pembatasan akses untuk belajar. Contohnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh senior-senior di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN sekarang sudah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN) yang menyebabkan korban meninggal dunia¹². Contoh kasus lainnya adalah ,wacana mengenai tes keperawanan

kepada perempuan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan³. Rencana program tes keperawanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan berdampak akan mempersempit akses terhadap pendidikan di Indonesia bagi perempuan. Kejadian ini menunjukkan kapasitas institusi pendidikan dalam mengawasi berjalannya proses pendidikan yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia masih teramat lemah. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi wadah yang memberikan pengetahuan HAM kepada anak muda, malah menjadi ruang yang merampas Hak Asasi Manusia anak muda. Di tengah kondisi yang telah disebutkan, berbagai organisasi masyarakat dengan sangat gencar merespon, namun suara dari siswa-siswa dan mahasiswa yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak pernah benar-benar didengar. Mereka tidak pernah mendapatkan ruang yang begitu leluasa untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Di sisi lain, pihak sekolah tentunya memberikan berbagai ancaman pemberhentian sementara atau permanen sebagai bayaran dari ruang politik yang didapatkan.

Beberapa contoh partisipasi politik yang tinggi juga terlihat di negeri ini, misalnya gerakan demonstrasi siswa SMP Negeri 1 Karang Tengah, Garut, Jawa Barat yang menuntut dinas pendidikan untuk mengganti kepala sekolah mereka yang kerab berperilaku kasar¹¹. Tidak hanya berdemonstrasi, mereka juga melakukan mogok belajar hingga tuntutan mereka terpenuhi. Walaupun hal tersebut baru sebatas tindakan reponsif yang tidak terprogram, gerakan seperti ini dapat dijadikan sebuah patokan bahwa keinginan untuk berpartisipasi itu selalu ada dalam diri setiap siswa sekolah.

Dari keterangan-keterangan yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah studi yang mengukur partisipasi politik anak muda yang tidak hanya diukur dalam dimensi pemberian suara dalam pemilu saja, namun sebuah partisipasi politik yang luas, dan bisa menimbulkan dampak langsung bagi kehidupan anak muda di sekolah atau universitas. Dengan alasan itulah, studi ini juga akan berfokus untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik siswa SMA/ sederajat dan mahasiswa. Faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik seseorang adalah keterpaparan orang tersebut terhadap pengetahuan HAM, keterpaparan media, ikatan keluarga, dan keaktifan berorganisasi. Pertimbangan ini diambil karena melihat konteks dan kapasitas siswa/mahasiswa dalam merespon kebijakan-kebijakan yang merugikan posisi mereka belum terlalu memadai. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kapasitas dalam melegitimasi hak-hak yang harusnya mereka terima. Pendidikan hak asasi

yang disediakan oleh sekolah semestinya mampu mendorong pembentukan ruang politik dan dorongan partisipasi bagi siswa. Oleh karena itu, studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat kemunculan siswa/mahasiswa untuk berpartisipasi politik dalam merespon permasalahan sosial dan permasalahan lain di lingkungannya.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura?
2. Bagaimana keterpaparan HAM anak muda dalam institusi pendidikan di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura?
3. Bagaimana pengaruh faktor-faktor keterpaparan pengetahuan HAM, ikatan keluarga, media, dan keaktifan dalam organisasi terhadap partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura?
4. Bagaimana hubungan antara keterpaparan terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia terhadap partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tingkat partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura.
2. Mendeskripsikan keterpaparan HAM anak muda dalam institusi pendidikan di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengaruh faktor-faktor keterpaparan pengetahuan HAM, ikatan keluarga, media, dan keaktifan dalam organisasi terhadap partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura.
4. Mengidentifikasi hubungan antara keterpaparan terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia terhadap partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura.

Hipotesis Utama

POLITIK PEMILIH MUDA

Keterpaparan anak muda terhadap Hak Asasi Manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *mixed method research* yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam metode penelitian campuran ini adalah pendekatan pragmatis, dimana peneliti melihat kepentingan yang besar pada masalah yang diangkat dalam penelitian (Rossman and Wilson, 1985). Di dalam penelitian ini juga dijelaskan alasan penggunaan metode campuran serta proses pengambilan data (Tashakkori and Teddlie, 1998). Metode campuran digunakan dengan alasan agar penelitian ini mendapatkan data yang komprehensif baik dari lapangan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner juga dengan menggabungkan data hasil observasi melalui wawancara terbuka kepada pihak-pihak yang dianggap berpengaruh di kota Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura pada kurun waktu Januari – Maret 2014.

Di dalam penelitian ini juga menggunakan data tambahan seperti data sensus, data observasi, data mengenai sikap, data berupa dokumen, dan data audiovisual.. Peneliti melakukan dua analisa, yaitu analisis statistik dan juga analisis tulisan serta gambar. Dengan kata lain, metode penelitian campuran dilakukan dengan pengukuran data secara tertutup yang digabung dengan observasi data terbuka (Creswell, 2003).

Data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data karakteristik responden, partisipasi politik, keterpaparan pengetahuan mengenai HAM, keterpaparan media, ikatan keluarga, dan keaktifan berorganisasi anak muda. Data primer ini akan didapatkan dari pengisian kuesioner dan dilengkapi dengan informasi terkait yang didapatkan dari FGD dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder di dapat dari data demografi dari kota Pekanbaru, Cirebon, Palu, Jakarta, dan Jayapura.

Di lima wilayah penelitian dipilih reponden berusia 16- 30 tahun. Penetapan umur anak muda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan batas umur anak muda sampai 30 tahun didasari oleh UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009. Penelitian akan dimulai dengan memilih dua SMA/ sederajat dan dua Perguruan Tinggi di masing-masing daerah Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura. Dari setiap sekolah dan perguruan tinggi tersebut akan diambil masing-masing 25 responden dengan *disproportionate stratified random sampling* sehingga target responden yang direncanakan adalah sebanyak lima ratus orang responden. Khusus

POLITIK PEMILIH MUDA

untuk wilayah Jakarta, dipilih dua wilayah administrasi yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, peneliti melaksanakan manajemen data yang terdiri dari pengolahan, penyuntingan, entri data, pembersihan, dan analisis data. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat dari setiap variabel yang diukur, analisis bivariat yang akan mengukur hubungan setiap variabel independen (keterpaparan pengetahuan HAM, keterpaparan media, ikatan keluarga, dan keaktifan berorganisasi) terhadap variabel dependen (partisipasi politik), serta analisis multivariat untuk mengetahui variabel independen apa yang paling mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Budaya HAM dan Demokrasi di Sekolah dan Kampus; Rendahnya Keterpaparan HAM di Sekolah dan Kampus

Pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia itu sendiri. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mengakui bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Adapun tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam konvenan tersebut adalah mengembangkan kepribadian manusia yang sadar akan harga dirinya, memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar sehingga semua orang dapat berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat.

Tujuan mendasar pendidikan, seperti dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah membangun manusia seutuhnya dan memperkuat HAM. HAM sendiri dipahami sebagai hak hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (kaelan:2002) dan merupakan hak hak individual yang berasal dari kebutuhan – kebutuhan serta kapasitas – kapasitas manusia (David Betham & Kevin Boyle). HAM merupakan kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dan di jamin oleh Pemerintah melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan pendidikan HAM sesungguhnya adalah sebuah pemberdayaan yang berujung pada perubahan sosial. Siapa saja yang perlu mengetahui pendidikan HAM? Tentu jawabannya adalah semua orang. Akan tetapi anak, orang tua, guru, pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting untuk mendorong praktiknya. Institusi pendidikan merupakan sebagai salah satu alat yang sangat penting untuk membentuk suatu pengetahuan dan budaya HAM. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003). Agar pengetahuan tentang HAM dapat menghasilkan perubahan

sosial, pendidikan HAM tidak hanya harus mengembangkan keterampilan praktis, akan tapi harus juga mendorong munculnya sikap dan perilaku yang sesuai.¹

Di 5 kota di mana penelitian ini dilakukan, keterpaparan HAM di sekolah dan universitas cenderung rendah. Pengukuran variabel ini terdiri atas dua dimensi, di antaranya penguasaan pengetahuan konseptual (kognitif) dan akses terhadap praktik HAM di sekolah/universitas. Pemaknaan HAM dalam dua dimensi ini dinilai sangat penting untuk menilai HAM sebagai kesatuan konsep dan praktik sekaligus. Pemahaman mengenai konsep HAM menyangkut kemampuan untuk membedakan persoalan HAM dengan persoalan hukum dan juga persoalan sosial biasa. Sementara di sisi lain, dimensi praktik berkaitan dengan akses yang diberikan oleh sekolah untuk menerapkan nilai-nilai HAM sebagai sebuah praktek bersama. Semboyan "*human rights as a human tradition*" pada institusi pendidikan seharusnya bukan hanya sebagai sebuah usaha penyelesaian silabus untuk ujian akhir nasional saja, namun menjadi sebuah simbol kepercayaan dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Tabel 1 Distribusi Responden terhadap Keterpaparan HAM dan Partisipasi Politik

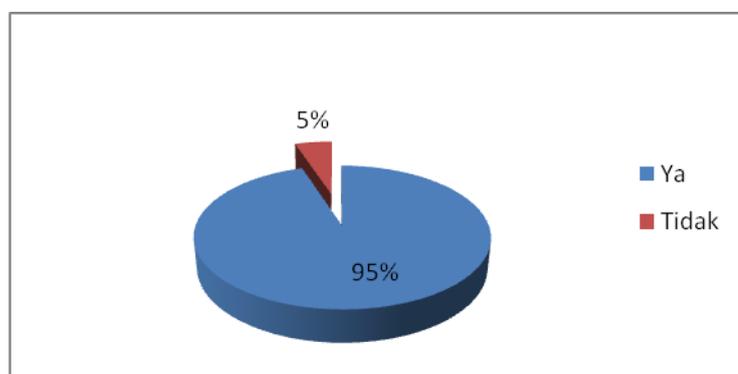
		Keterpaparan HAM		Total
		Rendah	Tinggi	
Partisipasi Politik	Rendah	152	99	251
		57,6%	41,9%	50,2%
	Tinggi	112	137	249
		42,4%	58,1%	49,8%
Total		264	236	500
		100,0%	100,0%	100,0%

Keterpaparan HAM yang dinilai dalam penelitian ini adalah segala bentuk akses informasi yang didapat oleh siswa sekolah menengah dan mahasiswa terhadap pengetahuan HAM. Keterpaparan HAM di dalam struktur kurikulum pendidikan menengah terdapat di dalam muatan umum, salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn).

¹ Delores, Jacques et al. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First CENTURY. UNESCO.

Dari analisis data yang dilakukan, didapatkan bahwa siswa dan mahasiswa cenderung telah mendapatkan materi HAM di dalam mata pelajaran di sekolah dan universitas. Penelitian ini menemukan 95.0% siswa dan mahasiswa mengaku sudah menerima materi mengenai HAM. Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kota Jakarta, guru dan dosen menyatakan bahwa mata pelajaran yang membahas HAM cukup banyak, misalnya pelajaran PKn kelas 10 yang membahas mengenai pengertian, sejarah, jenis, dan Piagam HAM, PKn kelas 11 yang membahas prinsip – prinsip demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, serta PKn kelas 12 yang membahas Pancasila dan sistem pemerintahan.

Diagram 1 Distribusi Responden terhadap Keterpaparan HAM melalui Mata Pelajaran



Selain pelajaran PKn, siswa SMA/ sederajat juga mendapatkan materi mengenai HAM melalui pelajaran Tata Negara pada jurusan IPS, begitu juga mata pelajaran Sejarah, Pancasila, Budi Pekerti dan Nasionalisme. Materi mengenai HAM juga disinggung dalam beberapa mata kuliah di beberapa jurusan universitas, di antaranya; Pengantar Ilmu Politik (FISIP), Birokrasi dan Demokrasi (Jurusan Ilmu Administrasi), Sosiologi Politik (Jurusan Sosiologi), Sosiologi Indonesia (Jurusan Sosiologi), dan Antropologi Politik (Jurusan Antropologi). Dalam melengkapi pembahasan mengenai HAM, isu gender juga kerap menjadi pembahasan spesifik di dalam mata kuliah tersebut. Selain itu, beberapa kampus mengadakan mata kuliah khusus mengenai isu ini, contohnya di Universitas Trisakti yang memiliki mata kuliah Demokrasi dan HAM, dan Universitas Indonesia yang memiliki mata kuliah MPKT (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi). Tapi sayangnya, untuk jurusan-jurusan tertentu (mayoritas jurusan IPA), pemahaman mengenai isu-isu ini masih

sangat minim. Namun penelitian ini tidak melakukan analisis konten dari semua mata pelajaran/kuliah yang disampaikan untuk menilai lebih jauh terhadap keterpaparan HAM.

Pemahaman siswa dan mahasiswa mengenai HAM dilihat dari pemahaman mereka mengenai pelanggaran HAM sesuai dengan DUHAM yang merupakan pedoman bersama untuk memahami HAM. Siswa dan mahasiswa di 5 kota memiliki anggapan bahwa tindak diskriminasi di sekolah, perudungan (*bullying*), pembunuhan massal terhadap suku/ras/agama/ideologi tertentu, perusakan tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM. Namun saat diberikan contoh kasus hukum biasa, siswa dan mahasiswa belum dapat menjawab dengan tepat.

Diagram 2 Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Siswi Hamil dikeluarkan oleh Sekolah Merupakan Pelanggaran HAM

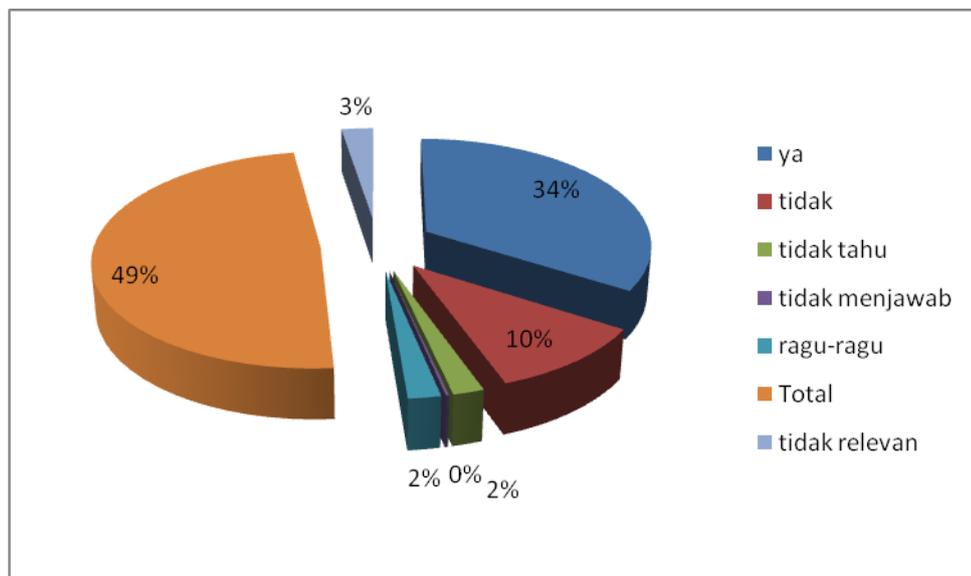


Diagram 3 Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Bullying Merupakan Pelanggaran HAM

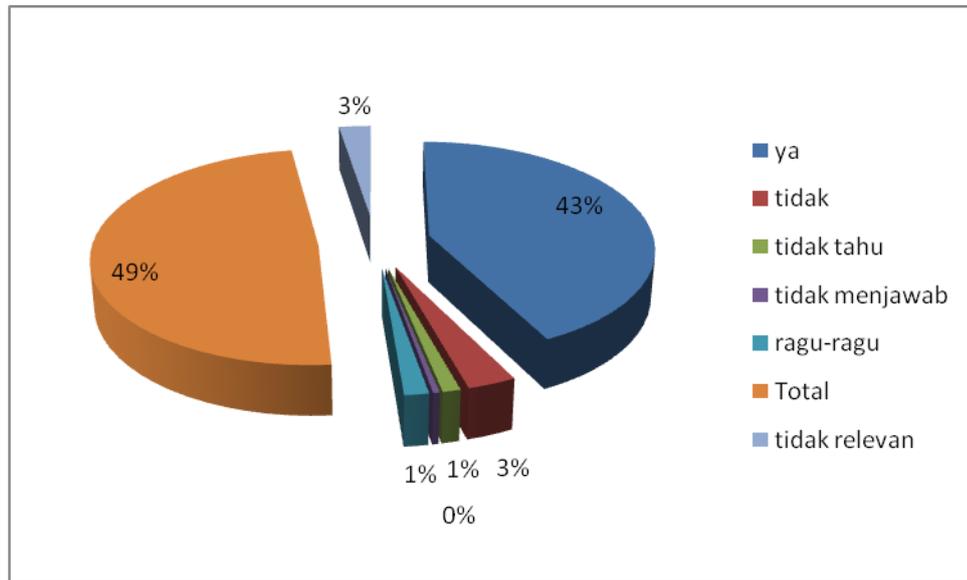
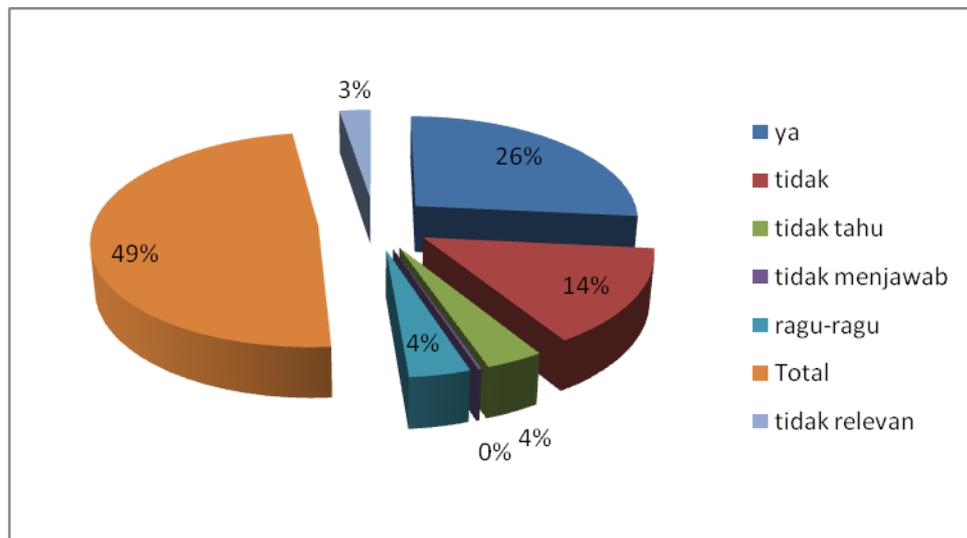
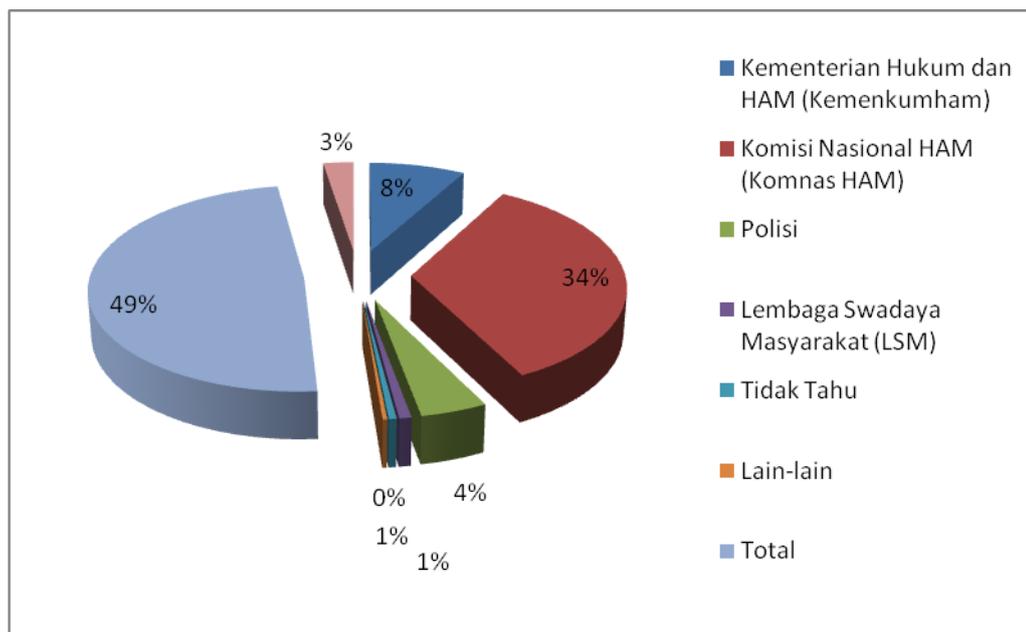


Diagram 4 Distribusi Jawaban Siswa/Mahasiswa Mengenai Kasus Merokok merupakan pelanggaran HAM



Penelitian ini memperlihatkan bahwa siswa dan mahasiswa cenderung mengetahui contoh pelanggaran HAM dari pelajaran sekolah dan lingkungan sekitar termasuk mengetahui tempat pengaduan atau pelaporan kasus HAM akan tetapi pemahaman mereka terhadap HAM masih dinilai cenderung rendah.

Diagram 5 Distribusi Pelaporan Kasus HAM

Saat dilakukan FGD, kelompok siswa dan mahasiswa dalam FGD di 5 kota mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan materi HAM di dalam mata pelajaran di sekolah dan universitas. Namun belum membahas HAM lebih dalam apalagi menjadikan HAM sebagai praktik bersama. Sedangkan guru dan dosen menjelaskan bahwa salah satu kontribusi keterpaparan HAM rendah di sekolah dan universitas disebabkan karena rendahnya kapasitas pengajar. Sumber bacaan dan bahan belajar guru dan dosen sangatlah terbatas. Sebagian besar hanya menggunakan buku teks pelajaran tanpa menambahkan sejumlah referensi dari luar bahan sekolah.

Bukan hanya persoalan kapasitas, terdapat persoalan lain terlihat lebih mendasar, seperti yang ditemukan di Jayapura, salah seorang guru yang hadir dalam FGD kelompok guru dan dosen menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di Papua. Siswa menilai keterpaparan HAM melalui mata ajar bagi mereka tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh mereka sebagai orang Papua, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, dan perampasan hak hidup. Pada titik ini, guru mengalami kesulitan untuk menjelaskan kewajiban negara yang belum dipenuhi hingga hari ini di Papua. Tidak jarang siswa menolak ajaran mengenai HAM dan kebangsaan.

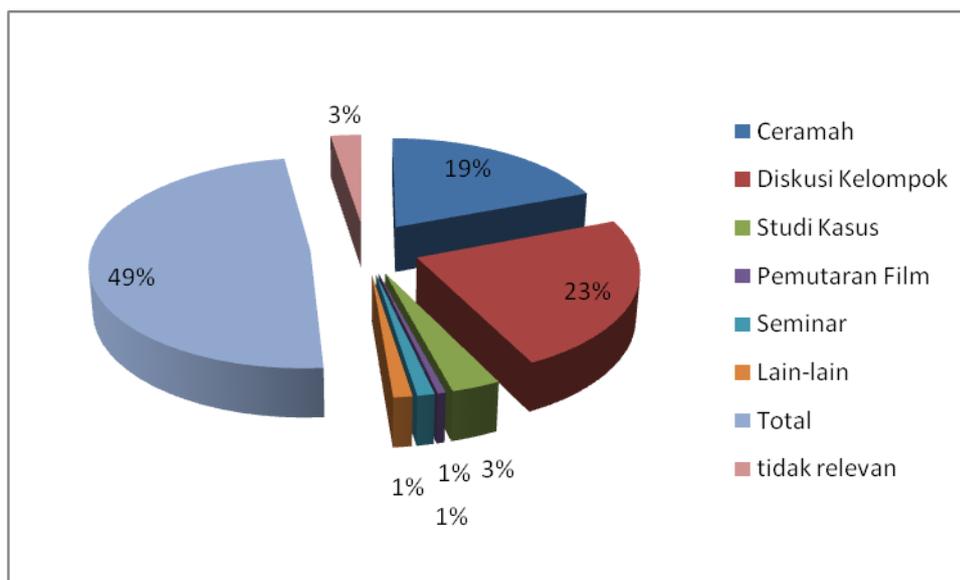
Permasalahan lain ditemukan pada tingkat kehadiran guru dan dosen di sekolah yang rendah, seperti juga dinyatakan oleh siswa dan mahasiswa di Cirebon. Terbatasnya

fasilitas sekolah dan kampus seperti kurangnya buku di perpustakaan menjadi persoalan yang memperburuk keadaan tersebut. Salah seorang dosen di salah satu Universitas di Cirebon membenarkan hal tersebut di dalam FGD. Menurutnya, sulit mendapatkan buku di Cirebon untuk mendukung proses belajar-mengajar. Siswa dan mahasiswa tidak memiliki akses terhadap wacana HAM lewat buku-buku yang bertemakan HAM. Pemanfaatan teknologi internet dalam mencari bahan-bahan tersebut tampak sangat kurang optimal, padahal situs-situs yang menawarkan buku gratis sangat banyak di dunia maya.

Pada FGD kelompok siswa, mahasiswa, dan guru – dosen di Pekanbaru, pembahasan HAM masih dalam kerangka yang jauh dari keseharian anak muda. Sebagai contoh, persoalan HAM yang dirujuk dalam pelajaran PKn atau Kewarganegaraan masih merujuk pada persoalan HAM nasional, yang terlalu berfokus kepada hak sipil dan politik. Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi bagian dari keseharian belum dikenali secara mendalam. Hal ini menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai pemenuhan HAM warga negara. Selain itu, ada kekhawatiran tersendiri dari para guru untuk membahas isu tertentu karena dinilai merupakan isu sensitif yang akan mengakibatkan gesekan di antara siswa. Pada FGD yang dilakukan, para guru menyatakan bahwa pluralisme adalah salah satu dari isu sensitif tersebut.

Minimnya Metode Penyampain Materi HAM di Sekolah dan Universitas

Di samping kapasitas, tingkat kehadiran guru dan dosen, serta fasilitas sekolah dan universitas yang menyediakan pengetahuan akan HAM, kontribusi lain yang menyebabkan jumlah siswa dan mahasiswa yang mengaku rendahnya keterpaparan HAM adalah metode penyampaian materi HAM. Penelitian ini menemukan metode penyampaian materi HAM di sekolah dan kampus lebih banyak menggunakan metode ceramah. Kelompok dosen mengungkapkan bahwa pemahaman siswa mengenai HAM cenderung rendah dibandingkan mahasiswa karena pembahasan HAM di kampus cukup dalam dan didukung oleh metode yang efektif, seperti diskusi kelompok.

Diagram 6 Distribusi Metode penyampaian Materi Mengenai HAM

Menurut salah satu dosen di sebuah Universitas di Pekanbaru, pendidikan HAM dan Demokrasi di kampus tidak memberikan warna idealisme, hanya normatif saja, apalagi dosen–dosen tidak mengimbangi materi dengan perkembangan internasional atau menyiapkan modul yang dapat merangsang idealisme. Tidak ada pengaruh yang membuat orang lebih berdaya melalui praktek HAM melalui materi-materi di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Peraturan ini menjadi legitimasi sekolah untuk menggunakan kurikulum sebagai akses keterpaparan HAM di sekolah. Selain lewat mata pelajaran PKn dalam Muatan Umum, mata pelajaran muatan lokal sebagaimana terdapat dalam Pasal 77N dalam Peraturan ini juga harus mewadahi gagasan-gagasan HAM. Muatan lokal adalah sebuah satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Guru dapat memasukan perencanaan belajarnya melalui silabus yang disusun oleh Musyawarah Guru Bidang Studi².

² Wawancara dengan Clifford Korwa Dinas Pendidikan Jayapura tanggal 27 Februari 2014

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pekanbaru pada 27 Februari 2014, Muatan Lokal di sekolah salah satunya berupa seni dan budaya. Dalam mata ajaran ini, didorong pengenalan serta melatih keterampilan siswa menari khas Riau. Serta lewat Muatan Lokal ini, siswa dapat membuat kerajinan lokal. Belum muncul sebuah ide dan gagasan lewat seni dan budaya untuk mewacanakan HAM atau menawarkan suatu pedoman mengenai kegiatan praktis untuk mendorong pengetahuan dan praktik tentang HAM. Padahal kesempatan menggunakan kurikulum untuk mewacanakan HAM lebih jauh sangat dimungkinkan.

Di belahan Indonesia lainnya, hasil wawancara dengan kepala bagian pendidikan menengah di Dinas Pendidikan Kota Palu memperlihatkan hal yang berbeda. Palu sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang begitu eksplisit menyatakan diri sebagai Kota Sadar HAM. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya kehendak untuk memasukan materi-materi HAM ke dalam setiap visi pembangunan wilayahnya. Namun, Dinas Pendidikan Kota Palu menginterpretasi ini sebagai sebuah himbauan untuk taat hukum dan aturan yang dibuat atasannya.

“Palu sadar HAM itu ya sadar hukum, tidak boleh ada demo, konflik, dan semua warga Palu harus patuh kepada peraturan-peraturan pemerintah”

Hal ini juga terlihat dalam FGD di Kota Palu, bahwa banyak pengakuan dari guru, dosen, dan mahasiswa yang kerab menerima ancaman. Terdapat sejumlah kasus guru yang dimutasi karena melakukan demonstrasi terhadap kebijakan sekolah. Konsep HAM digunakan untuk memenuhi kepentingan penguasa.

HAM Bukan Sekadar Bacaan

Sebuah kasus di Cirebon, kekerasan yang menghilangkan nyawa dilakukan oleh senior terhadap seorang mahasiswa Mahapeka IAIN Syekh Nurjati Cirebon³. Mahasiswa tersebut tewas setelah satu minggu dirawat di Rumah Sakit. Korban tersebut tewas di saat mengikuti inisiasi pencinta alam Universitas IAIN Syekh Nurjat. Kekerasan verbal yang berujung pada fisik mencabut nyawa tersebut terjadi dalam sebuah lingkungan akademik.

³ <http://www.sofi-institute.com/2014/02/mahasiswa-iain-cirebon-tewas-usai-ikut.html>

Kasus yang terjadi di Cirebon dianggap biasa, bukan pelanggaran HAM⁴. Kejadian yang terjadi di lingkungan pendidikan haruslah diangkat sebagai persoalan HAM karena sekolah sebagai institusi pemerintah wajib melindungi siswa. Sebagian besar siswa dan mahasiswa dalam FGD menyatakan bahwa persoalan yang dekat dengan mereka adalah *bullying*. *Bullying* masih menjadi masalah signifikan sekolah di dunia (McEachem et al, 2005 dalam Aluede, 2011). Penelitian Seals dan Yong's (2003 dalam Hong & Espelage, 2012) diantara 1126 siswa di Mississippi ditemukan 24% siswa melaporkan dirinya menjadi korban *bullying*. Berdasarkan data Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (THC), akibat *bullying* 14 pelajar SMA 3 Semarang dan lima pelajar SMA Don Bosco Jakarta cedera (Juli 2012)

Namun persoalan *bullying* ini belum mendapat respon dari pengajar padahal persoalan HAM ini sangat dekat dengan siswa dan mahasiswa sering kali tidak mendapatkan pembahasan di dalam institusi pendidikan. Beberapa contoh lain mengenai praktik HAM di sekolah, sejumlah siswa di SMAN 5 Cirebon memutuskan tidak mengikuti Ekstrakurikuler (ekskul) karena diduga tidak ada transparansi keuangan di sekolah mengenai anggaran dan penggunaan dana ekstrakurikuler. Saat ditanyakan alasannya, siswa menyatakan tidak ada akses untuk menanyakan kepada pihak sekolah. Sementara siswa di Palu menyatakan bahwa ada kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa di sekolah, yang menyebabkan pelaporan guru ke pihak kepolisian. Kasus – kasus yang disampaikan siswa dan mahasiswa di dalam FGD hendak memperlihatkan bahwa keterpaparan HAM bukan sekadar bacaan tetapi haruslah dibahas dan dipraktikkan di sekolah dan kampus.

Sebenarnya Organisasi intrasekolah dan intrakampus seperti OSIS dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan pendidikan, mempunyai peran signifikan untuk mendorong dan mempromosikan budaya HAM dan berdemokrasi di

⁴ Pengertian *bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 menyatakan “ siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

sekolah dan di universitas. Namun organisasi tersebut cenderung tidak dimanfaatkan sebagai ruang untuk membahas praktik HAM di sekolah dan kampus.

Faud Faiz⁵, Dosen IAIN Cirebon, mengatakan kampus sebenarnya telah mendukung praktek HAM dalam arti memberikan wadah untuk BEM dan UKM, tetapi tidak menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat memahami permasalahan tersebut. Menurut Siti Musdah Mulia, salah seorang tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini, menilai bahwa tidak cukup hanya membahas tentang HAM di sekolah atau kampus melalui mata pelajaran atau secara khusus ada materi tentang HAM karena sesungguhnya HAM itu harus terinternalisasi dalam semua mata pelajaran. HAM adalah nilai bagaimana memanusiakan manusia. Guru – guru haruslah mendapatkan pendidikan HAM atau mendapatkan tambahan keterampilan melalui pelatihan agar guru – guru. Menurutnya Institusi pendidikan seharusnya berdiri paling depan untuk mensosialisasikan HAM.

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2014, menyatakan bahwa Demokrasi adalah *way of life*. HAM harus diajarkan lebih ringan dan “ngepop”, yang paling penting adalah membawa isu HAM ke hal – hal yang realistis. Sementara itu, Lia Toriana, Program Officer Creative Youth Department Transparency International Indonesia, menyatakan budaya berdemokrasi untuk menanamkan nilai – nilai HAM haruslah dipahami sebagai cara berpikir dan bersikap. HAM haruslah menjadi komponen di seluruh aspek, bukan sekadar hal yang harus dihafal. Bukan hanya memasukan materi HAM di setiap materi, akan tetapi bagaimana mengajarkan praktik demokrasi dan HAM.

Kesadaran HAM adalah kemampuan memahami hak dan kewajiban. Memberikan pemahaman HAM kepada siswa dan mahasiswa hingga pada tataran praktek akan mendorong peewujudan nilai demokrasi. HAM bukanlah ditujukan untuk siswa/mahasiswa semata (sebagai objek) akan tetapi bagaimana HAM dapat menjadi nilai, perangkat dan elemen didalam sebuah institusi pendidikan

Pendidikan Berbasis Hak

Untuk mewujudkan sistem pendidikan berbasis hak asasi manusia diperlukan strategi dan usaha dari pemerintah. *Special Rapporteur* Hak Pendidikan PBB Katarina

⁵ Wawancara tanggal 25 Februari 2014

Tomasevsky menyimpulkan bahwa hak atas pendidikan sudah terpenuhi jika empat indikatornya terpenuhi⁶ yaitu pendidikan harus dapat disediakan (*available*), dapat dijangkau (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*) dan dapat disesuaikan (*adaptable*). Katarina Tomasevsky menyampaikan hal ini dalam makalahnya berjudul *Universalizing the Right to Education of Good Quality: A Rights-based Approach to Achieving Education for All* dalam Workshop Regional UNESCO di Manila, Filipina. Menurutnya Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan setiap warga negaranya. Berikut ini penjelasan empat indikator tersebut :

Availability (*ketersediaan*), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

Accessibility (*keterjangkauan*), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi gender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekadar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Hak atas pendidikan seyogianya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar.

⁶ Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi di Tiga Daerah Pusham UII

Acceptability (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru, tetapi cakupan yang sesungguhnya jauh lebih luas dari yang dicontohkan tersebut. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor, dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta.

Adaptability (kebersesuaian), mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Karena HAM tidak berdiri sendiri, kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan HAM tersebut melalui pendidikan. Hal ini memerlukan analisis lintas sektoral atas dampak pendidikan terhadap hak asasi manusia, misalnya, memonitor tersedianya pekerjaan bagi lulusan dengan cara melakukan perencanaan terpadu antarsektor terkait.

Untuk menerapkan sistem tersebut terdapat prasyarat, yaitu pertama, pemenuhan dan tanggung jawab dari Pemerintah, kedua membentuk prespektif guru mengenai hak dan yang ketiga, mendorong pelibatan aktif siswa dalam hal – hal yang berkaitan langsung dengan hak mereka. Hal ini dapat diwujudkan sejak perencanaan di tingkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (depdikbud), yaitu dengan cara membuat sekolah – sekolah eksperimen HAM⁷.

Menurut Saul Bleskadit Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jayapura, kurikulum 2013 sebenarnya merupakan implementasi pendidikan berbasis hak. Menurutnya, basis penyusunan standar Standar Kompetensi Lulusan siswa 2013 mencakup Sikap, Pengetahuan, Keterampilan. Sehingga, lebih banyak mendorong sikap dan praktik HAM di sekolah. Mathias Wiran, Sekretaris YPPK F Asisi Papua, menyampaikan bahwa rendahnya tingkat kehadiran guru di sekolah merupakan persoalan yang mempersulit peenerapan kurikulum yang mengarah pada pendidikan berbasis hak. Guru belum selesai dengan persoalan yang dihadapinya, yaitu minimnya penghasilan guru sehingga guru lebih

⁷ Wawancara Loddy Paat Dosen UNJ

banyak mencari tambahan baik di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah. Hubungan antara sekolah dan LPMP yang merupakan lembaga penyusun kurikulum untuk memberikan penguatan kapasitas guru untuk penerapan kurikulum 2013 tidak berjalan dengan baik. Tidak semua sekolah diundang dalam membahas kurikulum. LPMP sendiri merupakan lembaga yang diisi oleh orang – orang yang sebelumnya berlatarpendidikan guru. Dalam pembahasan kurikulum, Wiran mengatakan bahwa ahli pendidikan, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mana dalam FGD diidentifikasi sebagai stakeholder tidak diikuti sertakan.

Sikap terbuka kepala daerah sangatlah dibutuhkan. Sebagai contoh Walikota Cirebon, Drs H Ano Sutrisno MM, menyampaikan bahwa telah ada ruang bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasinya (kebutuhan anak). Cara yang dilakukan Walikota Cirebon adalah dengan melakukan kunjungan rutin setiap Jumat, dengan sejumlah stakeholder (diantaranya guru dan pemuda). Forum ini dapat mendorong perubahan cara pandangan dan sikap pendidik terhadap pelajar⁸. Hal yang dilakukan oleh walikota Cirebon ini adalah fungsionalisasi partisipasi antara warga dan negara sehingga akhirnya bermuara pada sebuah kebijakan partisipatif walaupun, proses ini belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.

Sekolah sebagai sebuah entitas memberikan pengetahuan, serta keterampilan yang bertujuan agar anak memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, pandangan, pendapat, serta keputusan atas semua hal yang terkait dengan kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai – nilai demokrasi seperti rasa hormat, saling menghargai, penerimaan, kepercayaan, keadilan, kebebasan serta menghargai HAM dapat ditumbuhkan melalui relasi antar siswa dan guru di sekolah. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini untuk dan berkaitan erat dengan manfaat dalam demokrasi.

Jelas bahwa Keterpaparan HAM di sekolah/universitas akan meningkatkan pengetahuan akan HAM. Akan tetapi esensinya HAM dapat diterapkan dalam perilaku sehingga menciptakan budaya HAM. Lingkungan pendidikan sebagai wadah, sekaligus cara untuk merealisasikan HAM. Untuk itu, pendidikan berbasis hak adalah sebuah jalan agar terbentuknya budaya dan praktek HAM dan demokrasi di sekolah dan Universitas.

⁸ Wawancara 27 Februari 2014

Mengingat dalam temuan penelitian ini, dimensi praktek dan konsep HAM masih belum memadai.

Partisipasi Politik Anak Muda dan Hak Asasi Manusia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan data jumlah pemilih muda pada Pemilu 2014 ini. Pemilih yang terdaftar berusia 17-20 tahun berjumlah 14 juta jiwa dan yang berusia 20-30 tahun berjumlah 45,6 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut telah tampak 40% dari 189 juta pemilih pada Pemilu 2014 adalah anak muda. Suara anak muda dianggap berpengaruh terhadap Pemilu 2014 dan menjadi lahan rebutan bagi partai politik. Akan tetapi, suara anak muda bukanlah sekadar angka.

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992 dan Beatham, 1986). Partisipasi politik menjadi seperti medium bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya kepada pihak-pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan. Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif (Surbakti, 1992). Pada partisipasi aktif, subjek politik dengan secara aktif melakukan tindakan politik seperti memilih dalam Pemilihan Umum. Sedangkan partisipasi pasif, subjek politik menjalankan suatu ketentuan politik dari pemerintah, seperti menaati peraturan lalu lintas.

Pada penelitian yang baru saja dilakukan oleh Transparency International (TI) Indonesia yaitu Persepsi Pemilih Pemula Pada Pemerintah, Korupsi, dan Pemilu Nasional 2014 (2014) menunjukkan hasil yang positif mengenai partisipasi politik anak muda di Jakarta, terutama mengenai keinginan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2014. Sebanyak 77% responden memutuskan akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu Presiden 2014. Selain itu, sebanyak 63% anak muda akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Penelitian yang dilakukan oleh Litbank Kompas (2014) pun mengeluarkan hasil positif dalam partisipasi politik anak muda bahwa 92,8 % anak muda akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif di Pemilu 2014.

Diagram 7 Distribusi Responden yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

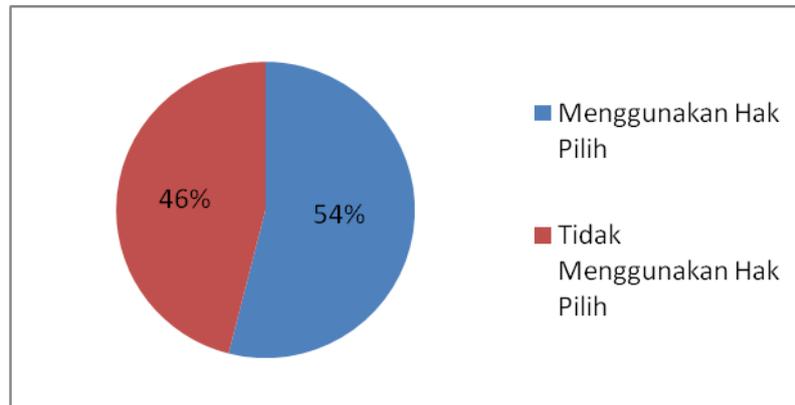


Diagram 1 menunjukkan presentase responden yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden. Ada 54% responden yang menggunakan hak pilihnya dan ada 46% responden yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hak pilih dalam Pemilu Presiden di dalam penelitian ini merangkum kepada responden baik yang sudah menggunakan hak pilih pertamanya pada Pemilu Presiden 2009 atau yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 2014 ataupun pada Pemilu Presiden 2019.

Partisipasi politik anak muda tidak hanya dapat dilihat dari sekadar keinginannya untuk memilih dalam Pemilihan Umum Nasional. Angka tinggi yang ditunjukkan oleh presentase penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum tidak bisa menjadi patokan utama untuk mengukur partisipasi politik anak muda. Partisipasi politik anak muda harus dipandang lebih luas lagi. Keikutsertaan dalam pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau OSIS, memberikan saran atau kritik kebijakan pemerintah, ataupun mendapatkan informasi bahwa terdaftar sebagai pemilih di Pemilihan Umum juga termasuk dalam partisipasi politik.

Diagram 8 Distribusi Responden Menurut Partisipasi Politik Anak Muda di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

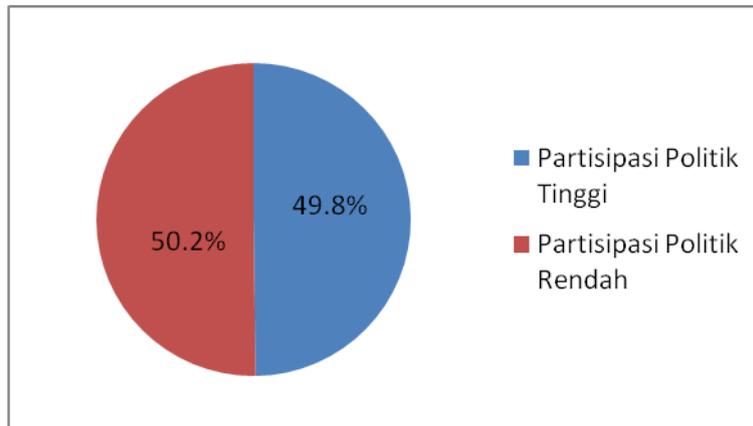


Diagram 2 menunjukkan bahwa 50,2% responden anak muda di Jakarta, Cirebon, Palu, Pekanbaru dan Jayapura mempunyai partisipasi politik rendah, sedangkan 49,8% responden memiliki partisipasi politik yang tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda tidak mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam politik. Walaupun perbedaan presentase responden anak muda yang mempunyai partisipasi politik rendah dan tinggi tidak terlalu mencolok, tetapi hal tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Potensi anak muda untuk memiliki partisipasi politik yang cenderung tinggi sangat mungkin terbuka. Anak muda mempunyai potensi untuk menjadi kelompok yang mempunyai partisipasi tinggi. Keadaan ini bisa berubah apabila anak muda didorong untuk mempunyai kesadaran akan pentingnya partisipasi politik. .

Diagram 9 Distribusi Responden yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI) di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

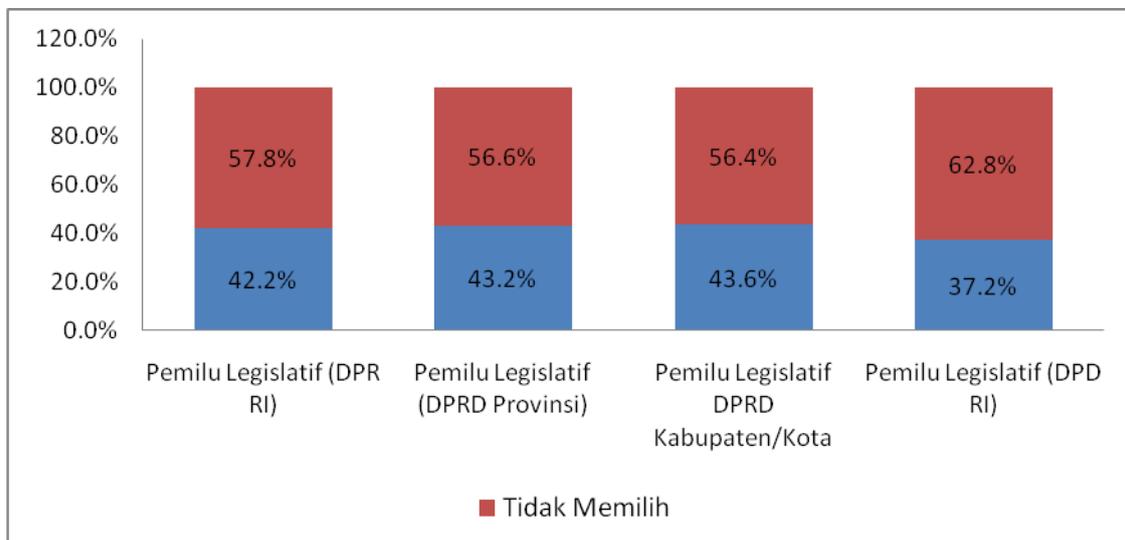


Diagram 3 menunjukkan penggunaan hak pilih responden dalam Pemilihan Umum Legislatif. Hak pilih dalam Pemilu Presiden di dalam penelitian ini merangkum kepada responden baik yang sudah menggunakan hak pilih pertamanya pada Pemilu Legislatif 2009 atau yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014 ataupun Pemilu Legislatif 2019. Rata-rata lebih dari 50% responden tidak atau tidak akan menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Hal ini yang menjadi variable kecil yang membangun presentase partisipasi politik anak muda rendah. Anak muda seolah-olah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif karena citra buruk yang muncul selama ini, seperti korup, suka tidur rapat dan tidak pernah memperhatikan rakyat. Seperti yang disampaikan Adeline M. Tumenggung dan Yanuar Nugroho dalam *Marooned In The Junction: Indonesia Youth Participation in Politics* (2005), menurut anak muda politikus cenderung oportunistis dan pembohong. Hal ini yang membuat hilangnya kepercayaan anak muda kepada politikus dan juga membuat anak muda enggan berpartisipasi politik. Padahal lembaga legislatif merupakan wadah penyalur aspirasi rakyat dan sesungguhnya tidak semua anggota legislatif mempunyai perilaku yang negatif.

Diagram 10 Distribusi Responden yang Memberikan Saran atau Kritik Tentang Suatu Kebijakan di Sekolah/Kampus di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

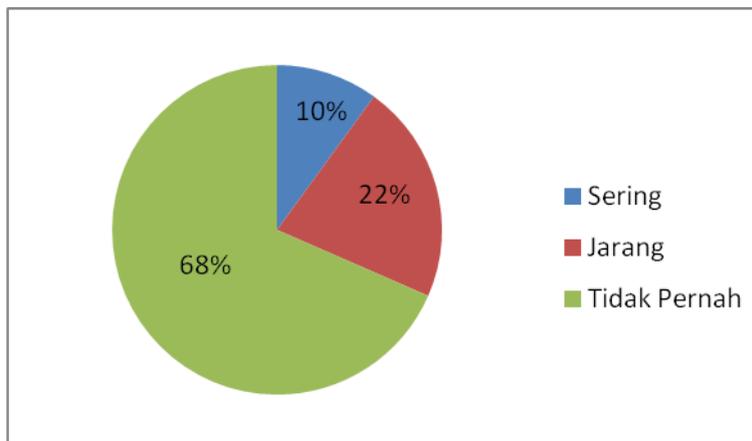
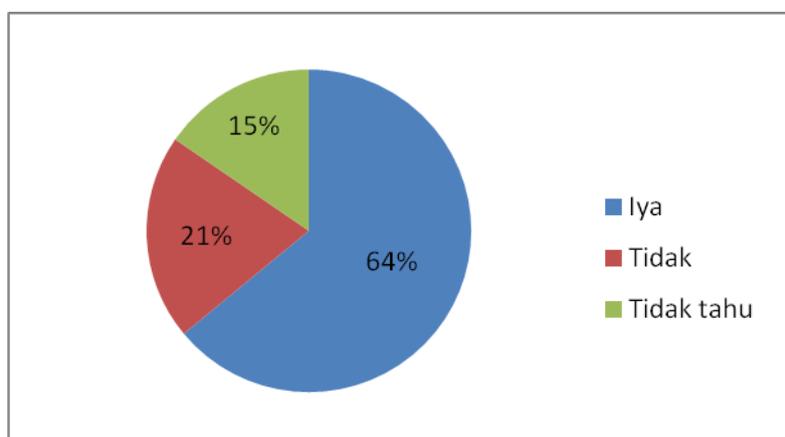


Diagram 4 menunjukkan partisipasi politik anak muda di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu dan Jayapura cenderung jarang mengkritik kebijakan di sekolah/kampus. Temuan yang tidak jauh berbeda adalah mengenai membuat dan mengisi petisi dan melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes siswa/mahasiswa terhadap pihak sekolah/kampus. Ditemukan 72,3% responden tidak pernah membuat petisi dan 64,4% responden tidak pernah ikut serta mengisi petisi sebagai bentuk protes terhadap pihak sekolah/kampus. Juga tercatat, 64,4% anak muda yang tidak melakukan demonstrasi di dalam sekolah/kampus. Selain itu, 72,8 % responden yang tidak memberikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti kebijakan yang berkaitan dengan Ujian Nasional, Biaya Pendidikan ataupun Badan Hukum Pendidikan.

Diagram 11 Distribusi Responden Mengenai Kesempatan untuk Memberikan Kritik dan Saran di Sekolah/Kampus di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura



Apakah sekolah/universitas memberikan kesempatan dan ruang bagi partisipasi politik siswa/mahasiswa? Diagram 5 mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ditunjukkan bahwa anak muda di lima kota cenderung menganggap bahwa sekolah/kampusnya memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk memberikan kritik dan saran. Lalu ada 71,4% responden menyatakan bahwa OSIS/BEM memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswanya untuk menyalurkan aspirasi di sekolah/kampus. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah/universitas sudah memberikan kesempatan dan ruang bagi partisipasi politik siswa/mahasiswanya di sekolah/kampus. Jika dikaitkan dengan diagram 4, mengapa kesempatan yang sudah ada ini seperti disia-siakan?

Temuan-temuan yang sudah disebutkan ini mengarahkan pada pemahaman bahwa kesadaran politik anak muda cukup rendah. Sekolah/ Universitas sudah memberikan kesempatan bagi partisipasi politik anak muda (siswa/mahasiswa), namun belum tentu mereka paham dan sadar akan kesempatan tersebut, misalnya siswa/mahasiswa bisa menyampaikan kritik atau saran bahkan melakukan protes terhadap pihak sekolah/ universitas. Seperti yang dikutip dari pendapat pelajar SMA di Cirebon berikut ini:

“Selama ini belum ada tindakan khususnya masalah kantin yang kotor. Kalo masalah yang pindah-pindah kelas juga belum, karena pengen-nya punya kelas sendiri.”⁹

Anak muda agaknya jadi gagap ketika terdapat kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini sebenarnya tidak bisa disalahkan semata kepada anak muda karena bisa jadi ruang aspirasi memang diberikan, namun tidak ada dorongan yang sungguh-sungguh dari pihak institusi pendidikannya untuk menjadikan ini sebagai budaya bersama. Hal lain yang juga berkaitan dengan partisipasi politik adalah istilah ‘politik’ itu sendiri. Saat ini, politik di Indonesia masih banyak dianggap sebagai sesuatu yang sangat jauh dari anak muda. Politik dipandang sebagai dimensi lain yang hanya sekadar urusan menyangkut pemerintah dan orang dewasa.

⁹ Berdasarkan Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Muhammad Hisbullah Amrie terhadap pelajar SMA di Cirebon pada Februari 2014.

Apakah di sekolah/universitas anak muda tidak mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan partisipasi politik? Tentu ada materi yang berkaitan dengan partisipasi politik, misalnya materi mengenai Demokrasi di dalam 1 bab di buku PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) untuk SMA Kelas XI (Suyatni, 2011). Akan tetapi hadirnya materi-materi pelajaran tersebut hanya seperti angin lalu saja. Pelajaran di sekolah pun menghadirkan politik sebagai sesuatu yang “akan dipahami saat kamu dewasa”. Menjadi sesuatu yang sulit, harus menghafal dan jauh dari anak muda. Dua pendapat berikut ini menguatkan bagaimana kondisi kurikulum di sekolah yang berkaitan dengan partisipasi politik:

“...politik yang benar seharusnya sudah dipelajari di sekolah bukan malah membentengi sekolah dari politik, karena politik yang seharusnya diajari ya adalah politik yang benar, dan politik itu adalah keniscayaan setiap orang dan ada keterkaitan yang kuat disini, bahwa pemilih pemula ini tidak diberi kesempatan apapun di sekolah terkait dengan kehidupan berpolitik mereka.”¹⁰

“...kalau kita bicara pelajaran demokrasi yang diajarkan di PKN ya itu jelas sangat kurang, harusnya pelajaran yang namanya demokrasi itu ada di segala mata pelajaran yang diajarkan, makanya tidak aneh kalau partisipasi politik anak-anak SMP dan SMA serta pemahaman mereka akan demokrasi dan HAM minim”.¹¹

Bahkan di Universitas tidak semua jurusan mendapatkan pengetahuan mengenai politik. Kemungkinan besar hanyalah mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu politik saja yang mendapatkan materi mengenai politik. Namun, bahkan menjadi mahasiswa jurusan ilmu politik saja tidak menjamin partisipasi politik yang tinggi. Bukti bahwa jurusan non-

¹⁰ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Christina Dwi Susanti terhadap Alazhar di Pekanbaru pada Februari 2014.

¹¹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Indah Yusari terhadap Loddy Paat di Jakarta pada Februari 2014.

politik tidak mendapatkan pengetahuan soal politik yaitu pendapat dari mahasiswa di dalam *Focus Group Discussion* yang dilakukan di Cirebon.

“Kebetulan saya dari jurusan sains. Untuk yang sains, tidak ada mata kuliah khusus, justru saya mengikuti hanya dari pemberitaan saja.”¹²

Politik pun semakin jauh dari anak muda, bahkan tidak jarang yang memandang negatif terhadap politik, seperti yang disampaikan seorang pelajar SMA dalam *Focus Group Discussion* yang dilakukan di Jakarta:

“Politik itu debat-debat aja tanpa ada hasilnya.”¹³

Pandangan negatif anak muda terhadap politik tidak hanya terdapat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Conflict Research* (2006) mengenai partisipasi politik anak muda di Irlandia Utara memperlihatkan bahwa politik masih dianggap sebagai hal yang membingungkan dan membosankan. Politik bahkan dipandang hanya fokus kepada persoalan agama dibandingkan kepada persoalan yang lebih nyata, seperti kesehatan atau pendidikan. Penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2011-2012 oleh *Institute for Sosial and Economic Research* di *University of Essex* menunjukkan 42,4% anak muda tidak tertarik dengan politik.

Partisipasi Politik dan Hak Asasi Manusia

Dari ulasan sebelumnya di dapat bahwa anak muda belum menyadari pentingnya partisipasi politik bagi kehidupan mereka. Hal ini direfleksikan dengan rendahnya partisipasi politik anak muda. Ulasan berikutnya adalah mengenai pengetahuan anakmuda mengenai Pemilihan Umum Legislatif RI. Jika melihat kembali kepada pembahasan sebelumnya mengenai penggunaan hak pilih di dalam Pemilu Legislatif, dimana anak muda cenderung

¹² Berdasarkan *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Muhammad Hisbullah Amrie terhadap Mahasiswa di Cirebon pada Februari 2014.

¹³ Berdasarkan *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Indah Yusari terhadap Pelajar SMA di Jakarta pada Februari 2014.

tidak menggunakan hak pilihnya, maka apa hal yang disajikan di dalam diagram 6 merupakan sesuatu yang bertalian.

Diagram 12 Distribusi Responden yang Mendapatkan Informasi bahwa Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI) di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

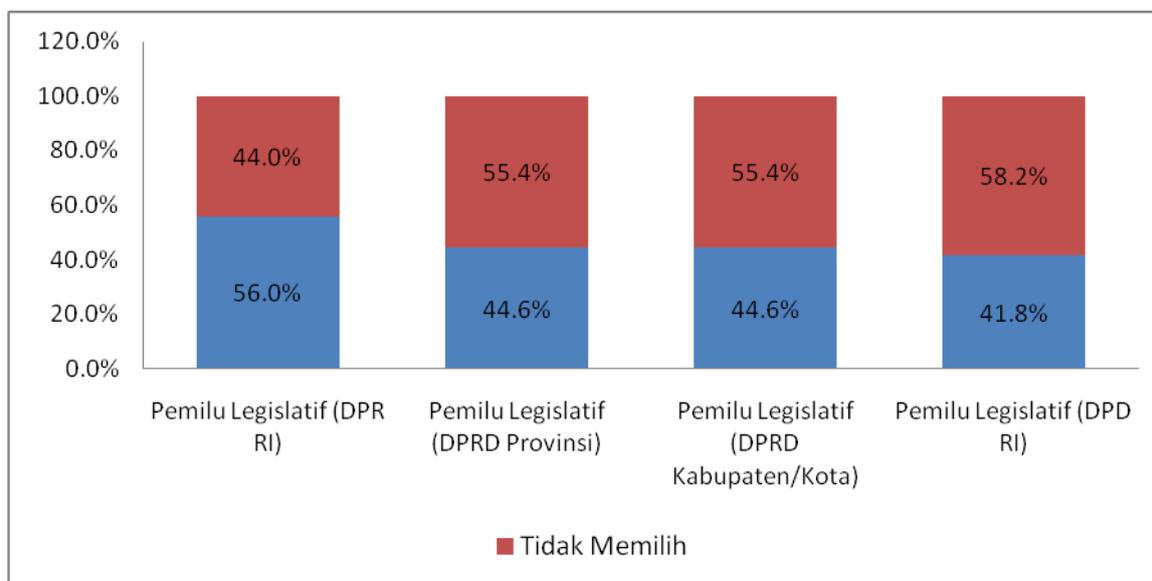


Diagram 6 memperlihatkan bahwa terdapat variasi dari suatu hal yang sama. Hampir setengah dari anak muda tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar atau tidak dalam Pemilu Legislatif. Satu fakta yang perlu diingat, jika ika terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif, seseorang pasti terdaftar dan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota legislatif pada berbagai tingkatan. Hasil yang didapat sangat menarik bahwa didapatkan angka yang berbeda-beda di setiap pertanyaan yang menanyakan informasi mengenai terdaftarnya responden sebagai pemilih di dalam Pemilu Legislatif pada berbagai tingkatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa adanya identifikasi yang berbeda-beda dari anak muda terhadap kepentingannya di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, terdapat persoalan dengan pengetahuan mengenai Pemilihan Umum yang dimiliki oleh anak muda. Anak muda yang suaranya diperebutkan dalam Pemilu agaknya memang benar sekadar dimanfaatkan karena jumlahnya yang banyak. Partisipasi politik yang seharusnya menjadi hak mereka malah dimanfaatkan semata-mata untuk memenangkan Pemilihan Umum dan mengurangi angka Golongan Putih (Golput).

“Saya, sih, kasihan sama anak muda, ya. Mereka, kan, jadi sasaran berbagai macam pihak dan di-abuse abis-abisan karena angkanya yang tinggi tadi.”¹⁴

Apa yang disampaikan salah seorang penggerak Hak Asasi Manusia salah satu LSM HAM di Jakarta sangatlah tepat untuk menggambarkan kondisi anak muda di Indonesia, terutama dalam masa-masa Pemilihan Umum. Partisipasi politik anak muda sesungguhnya merupakan salah satu hak politik yang seharusnya diberikan dan dijamin oleh negara. Negara harus memastikan bahwa anak muda memahami hak serta perannya di dalam partisipasi politik. Anak muda bukan lagi hanya dipandang sebagai pihak dengan jumlahnya yang besar, yang tidak tahu apa-apa, dan bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Sehingga, pemahaman mengenai fungsi kelembagaan negara mereka yang rendah selalu memposisikan anak muda untuk tidak memikirkan haknya, apalagi aspirasinya.

Tabel 2 Distribusi Responden Menurut Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Keterpaparan HAM di Jakarta, Cirebon, Pekanbaru, Palu, dan Jayapura

Keterpaparan HAM	Partisipasi Politik				Total		Koef. Phi	P value
	Rendah		Tinggi		n	%		
	n	%	n	%				
Rendah	52	57.6	12	42.4	264	100.0	0.156	0.000
Tinggi	9	41.9	37	58.1	236	100.0		
Jumlah	51	50.2	49	49.8	500	100.0		

P Value < 0.05

Tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel keterpaparan HAM dan partisipasi politik mempunyai hubungan yang positif. Anak muda dengan keterpaparan HAM tinggi cenderung juga memiliki partisipasi politik yang tinggi. Pemahaman dan akses terhadap pengetahuan HAM memiliki andil dalam mendorong partisipasi politik anak muda. Jika melihat kepada hasil presentase partisipasi politik anak muda yang cukup rendah, maka ada pemahaman

¹⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Indah Yusari terhadap Haris Azhar di Jakarta pada Februari 2014

mengenai hak dan kewajiban, yang terangkum secara terintegrasi dalam pengetahuan Hak Asasi Manusia, yang belum terpenuhi pemahamannya oleh anak muda.

Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa p value = 0.000 (p value < 0.05), menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi politik antara anak muda dengan keterpaparan HAM rendah dengan anak muda dengan keterpaparan HAM tinggi. Hubungan antara keterpaparan HAM dengan partisipasi politik juga diperlihatkan oleh nilai koefisien Phi sebesar 0.156. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa terdapat 15,6% kecenderungan anak muda dengan keterpaparan HAM yang tinggi juga mempunyai partisipasi yang tinggi. Angka ini akan menjadi semakin besar, apabila tingkat keterpaparan HAM dari anak muda juga meningkat.

Membicarakan partisipasi politik tentunya berkaitan erat dengan akses politik (Rossi, 2009), maka hal ini mengarahkan kita kepada adanya akses pengetahuan yang bisa didapat dan kesempatan untuk terlibat baik secara aktif dan pasif. Akses politik secara langsung menjadi bagian dari hak politik. Pemaparan mengenai hak politik tercantum dan diakui secara internasional di dalam Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik serta di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik di dalam pasal 25 (1966)¹⁵ menyebutkan mengenai partisipasi politik yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹⁶ juga menjelaskan mengenai partisipasi politik. Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sudah menjadi pondasi yang

¹⁵ "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih,
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum"

¹⁶ "Pasal 21:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuatan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara."

kuat untuk meyakinkan semua pihak, baik institusi pendidikan ataupun pemerintah pusat bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara *sahih* harus dipenuhi. Dengan begitu anak muda jelas sudah dijamin haknya untuk mendapatkan informasi mengenai hak politiknya dan hak tersebut dijamin dengan baik oleh negara.

Politik dan Hak Asasi Manusia saling terkait bukan berdasarkan pada gagasan hak itu sendiri, melainkan juga mencakup ide kebebasan. Ide kebebasan ini tidak dilihat terutama sebagai bagian dari HAM, melainkan sebagai ruang bagi pemenuhan hak tersebut (ELSAM, 2008). Sehingga, anak muda berhak untuk mendapat pengetahuan akan politik sehingga mereka mempunyai kesadaran positif dalam partisipasi politik.

Oleh karena itu, konsep HAM yang lemah cenderung membawa anak muda tidak memiliki konsepsi dalam menjalankan gagasan ini sebagai sebuah kesadaran politik. Tidak mengherankan, partai yang dihuni oleh pelaku pelanggaran HAM masih diminati oleh anak muda. Hal ini sama seperti apa yang diperlihatkan oleh penelitian ini, dimana HAM belum menjadi sebuah tradisi politik anak muda. Pilihan politik yang diambil tidak melalui pertimbangan yang berwawasan hak asasi.

Partisipasi politik bukan hanya sebatas peningkatan partisipasi politik anak muda, namun juga harus dilihat partisipasi politik bagaimana yang dimaksud? Partai apa yang dipilih? Politikus mana yang dipilih? Pertanyaan yang paling penting, apakah partisipasi politik tersebut lahir dari keinginan anak muda atau sesuatu yang dipaksakan demi pandangan tertentu?

“Kalau menurut saya, anak muda sekarang apatis ke politik karena perilaku pemimpin yang buruk.”¹⁷

Berdasarkan pendapat seorang guru di dalam Focus Group Discussion yang dilakukan di Cirebon mengarahkan kepada kualitas subjek yang dipilih serta keterlibatan anak muda di dalam politik di level negara. Ketika partisipasi politik anak muda rendah, tidak bisa kemudian hanya diarahkan kepada sisi anak muda, namun juga harus dilihat juga para politikus yang akan dipilih di dalam Pemilu.

¹⁷ Berdasarkan Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Muhammad Hisbullah Amrie terhadap Mahasiswa di Cirebon pada Februari 2014.

Cara pandang politik yang memunculkan ruang partisipasi, menyorot kepada peran subjek-subjek yang terlibat. Pada era demokrasi ini, subjek yang paling dominan, bisa kita temukan di dalam sega sisi aktivitas negara adalah partai politik. Namun ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, apakah partai politik yang dibangun oleh orang-orang tersebut atas nama demokrasi atau atas nama kekuasaan? Apakah partai-partia tersebut mempedulikan Hak Asasi Manusia? Apakah partai politik tersebut “besahabat” dan “ramah” terhadap kepentingan dan hak anak muda? Semua pertanyaan tersebut harus bisa dijawab supaya masyarakat, terutama anak muda, tidak dibutakan pada politik praktis semata.

Jika ada ruang yang memberikan kebebasan anak muda dan seluruh masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi ini, tentu demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Ruang tersebut di dapatkan dari adanya Hak Asasi Manusia. Ketika informasi mengenai politik bisa jelas dan transparan didapatkan, tentunya akan mendukung adanya partisipasi politik yang positif pada anak muda. Selain itu akan muncul kesempatan untuk mengartikan ulang mengenai pemahaman partisipasi politik anak muda. Partisipasi politik anak muda yang bukan tak bermakna dan tanpa ideologi. Harus ada cara yang diubah ke arah yang lebih kreatif untuk “menantang” dan memberi kesempatan anak muda untuk berpartisipasi dalam politik, untuk menyampaikan aspirasi politiknya (Nugroho, 2005). Keterlibatan anak muda di dalam politik sangatlah relevan, tentunya dengan menemukan cara yang membuat anak muda lebih aktif. Anak muda tidak bisa disia-siakan karena anak muda merupakan subjek politik yang mempunyai kesadaran, kemampuan berpikir serta idealisme yang tinggi. Selain itu, dengan adanya ruang berpolitik yang lebih transparan, bisa mengusung lahirnya kebenaran publik untuk seluruh rakyat Indonesia. Politikus tidak lagi dipandang sebagai sosok oportunistis dan politik tidak dilihat semata-mata sebagai debat-debat tanpa solusi.

Anak Muda: Organisasi, Keluarga, dan Partisipasi Politik

Organisasi Anak Muda, Sebuah Rumah Yang Hilang

Dalam sejarah Indonesia, aktivitas berorganisasi adalah rumah bagi para pemuda untuk berkontribusi melahirkan peristiwa-peristiwa politik yang dikenang hingga hari ini. Boedi Oetomo, sebuah organisasi yang diklaim sebagai motor kemunculan nasionalisme Jawa, berkontribusi terhadap perubahan sejarah Indonesia. Gerakan-gerakan politik pemuda dalam masa pergerakan nasional hingga gerakan mahasiswa 1998 melahirkan

organisasi-organisasi yang jumlahnya tidak sedikit. Hingga saat ini, kita merasakan hikmah dari aktivitas-aktivitas pemuda tersebut. Lewat organisasi-organisasi tersebut, pemuda menumpahkan partisipasi politiknya.

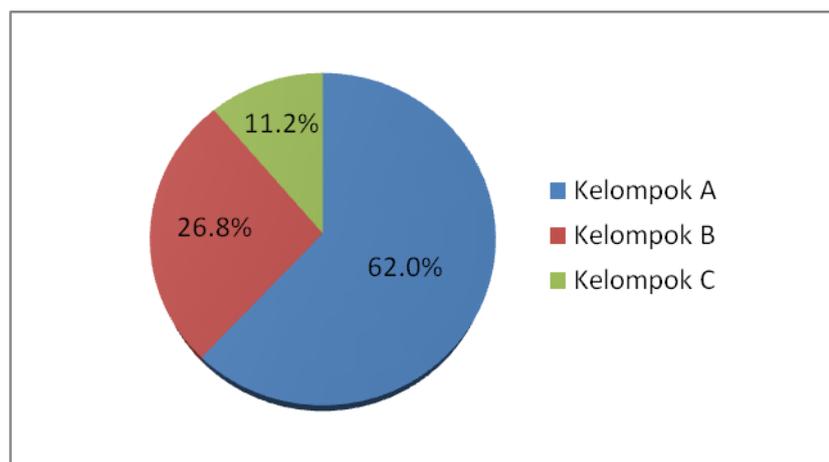
Pada kaitannya dengan partisipasi politik, keikutsertaan anak muda dalam berorganisasi menjadi salah satu faktor yang dinilai berpengaruh terhadap hal tersebut. Partisipasi politik sendiri didefinisikan oleh Conway (1991) sebagai bentuk keikutsertaan warga Negara dalam ruang lingkup politik, dirancang dan diakui oleh Negara, untuk mempengaruhi struktur pemerintahan, keputusan dan kebijakan pemerintah, serta otoritas pemerintah melalui tingkatan yang berbeda (baik pemerintahan local maupun nasional). Verba (1995) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara dengan maksud mempengaruhi tindakan pemerintah, baik secara langsung dengan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan publik, maupun secara tidak langsung dengan memberikan suara pada pemilihan pemangku kebijakan. Dalam perjalanannya, definisi partisipasi politik ini mengalami perkembangan untuk menjelaskan bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh setiap warga Negara, termasuk di dalamnya anak muda.

David Betham (1986), seorang filsuf Inggris, menekankan pentingnya kontrol kolektif yang dilakukan oleh warga terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama. Pewujudan kehidupan bersama yang lebih baik adalah sebuah tujuan luhur dari partisipasi politik yang sah untuk terwujudnya demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, kita melihat bagaimana usaha dan potensi tersebut digawangi anak muda melalui partisipasi yang mereka lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh kelompok usia muda, maka akan semakin besar juga kontrol terhadap berjalannya penyelenggaraan kehidupan bersama. Mengingat Indonesia berada pada fase bonus demografi, usaha ini tentunya akan menjadi aset politik bagi berjalannya demokrasi di Indonesia.

Dalam sebuah studi, Prihatiningtias (1993) menemukan bahwa tingkat keanggotaan (jabatan) dalam sebuah organisasi berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi yang dilakukan. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin tinggi pula kesempatan berpartisipasi dari orang tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang untuk dapat menduduki jabatan tinggi dalam setiap organisasi, namun pengalaman berorganisasi serta performa dalam berorganisasi pada setiap individu menjadi salah satu nilai yang diperhitungkan dalam pemilihan ketua atau jabatan tinggi lainnya dalam organisasi-organisasi yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, tingginya jabatan

seseorang dalam sebuah organisasi merefleksikan, secara tidak langsung, keaktifan orang tersebut dalam berorganisasi. Dengan dasar ini, peneliti mengkategorikan responden dalam 3 kelompok yang merefleksikan keaktifan anak muda dalam organisasi.

Diagram 13 Distribusi Responden Menurut Keaktifan dalam Berorganisasi Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura



Keterangan:

- Kelompok A: tidak mengikuti organisasi apa pun
- Kelompok B: menjadi anggota dalam organisasi baik tingkat sekolah/universitas, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau nasional
- Kelompok C: menjadi pengurus harian dalam organisasi baik tingkat sekolah/universitas, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau nasional

Dari Diagram 7 dapat dilihat bahwa anak muda cenderung pasif untuk mengikuti kegiatan dalam berorganisasi, sebagian besar anak muda di 5 kota memilih untuk tidak mengikuti organisasi apapun, baik di sekolah atau universitasnya. Untuk menjelaskan fenomena ini, peneliti menghubungkannya dengan fenomena alienasi politik, yang mungkin saja dirasakan oleh siswa/mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian. Barner-Barry & Rosenwein (1985) yang dikutip Aulia (1999) menyatakan:

“Jika seseorang tidak dapat mengidentifikasi dirinya dengan sistem politik, maka hubungan orang tersebut dengan sistem politik dapat dikatakan mengalami alienasi”

Hal ini dapat kita hubungkan dalam dunia berorganisasi di sekolah maupun di kampus. Jika seseorang tidak merasakan pengaruh yang berarti pada keberlangsungan

hidup bersekolah atau berkuliahnya dengan organisasi yang ada, maka siswa atau mahasiswa tersebut merasakan fenomena yang dinamakan alienasi. Alienasi sendiri memiliki 5 dimensi ukur di dalamnya; (1) *Powerlessness*, yaitu saat di mana seseorang beranggapan bahwa dia tidak dapat mempengaruhi sistem di sekitarnya, (2) *Meaninglessness*, di mana seseorang tidak percaya terhadap masa depan yang akan ia hadapi, (3) *Normlessness*, yaitu saat seseorang percaya bahwa hanya tindakan kotor yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, (4) *Isolation*, yaitu penolakan terhadap norma, dan (5) *Self Estrangement*, yaitu dependensi seseorang terhadap hasil yang akan ia capai (Seeman, 1959).

Empat dimensi alienasi diukur oleh Aulia (1999) sebagai dimensi yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi apatis. Semakin besar alienasi politik (yang diukur dari dimensi *powerlessness*, *meaninglessness*, *normlessness*, dan *isolation*) yang dirasakan mahasiswa, semakin besar pula kemungkinan untuk tidak melakukan bentuk partisipasi politik apapun. Hal ini menjadi sebuah alasan yang menjelaskan besarnya jumlah siswa/mahasiswa dengan keaktifan berorganisasi yang rendah. Semakin besar siswa/mahasiswa merasa bahwa mengikuti organisasi tidak akan membawa perubahan berarti dalam kehidupan mereka, semakin besar pula kecenderungan siswa/mahasiswa untuk menjadi apatis dan tidak mengikuti organisasi apapun.

Dalam wawancara dengan salah satu aktivis di Riau, beberapa alasan mengapa anak muda tidak ikut berperan serta dalam organisasi dapat dilihat pada pendapat berikut,

“Salah satu faktornya dikarenakan masih melemahnya nilai-nilai atau peran organisasi itu sendiri, saya tidak kaget dengan hal tersebut. Hal ini bisa jadi masalah penting di kemudian hari. Kalau saya lihat, belum banyak pemuda yang berkarya untuk masyarakat. Hambatan selanjutnya adalah individu anak muda itu sendiri, kadang-kadang mereka merasa untuk apa ikut berorganisasi dan hanya ikut-ikutan...”¹⁸

¹⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Christina Dwi Susanti terhadap Sonika PSMTI di Pekanbaru pada Februari 2014.

Kemampuan organisasi untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bersama menjadi salah satu alasan yang cukup kuat dalam mendorong lemahnya aktivitas ini. Organisasi tidak memiliki perspektif untuk memecahkan persoalan dari anak-anak muda sehingga hal ini membentangkan jarak yang begitu besar dari anak muda dengan organisasinya.

Organisasi dan Partisipasi Politik Anak Muda

Prihatiningtias (1993) mengutip definisi partisipasi politik Rush (1986) sebagai kegiatan warga Negara yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak, namun sebagai tindakan warga Negara untuk menduduki jabatan dalam tataran organisasi, serta bagaimana warga Negara memberikan dukungan atau sumbangan terhadap organisasi tersebut. Meskipun demikian, definisi ini lebih cocok untuk dikategorikan sebagai “keaktifan dalam organisasi”. Fournier (2008) menggunakan definisi partisipasi politik yang lebih luas dan dapat dilakukan oleh setiap warga Negara, dalam hal ini anak muda, yaitu menilai bagaimana anak muda berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi maupun pergerakan anak muda dalam isu tertentu. Untuk merangkum definisi partisipasi politik yang ada, peneliti mendefinisikan partisipasi politik anak muda sebagai aktivitas anak muda untuk mempengaruhi tidak hanya pemerintah, namun sistem di sekitarnya yang juga memberikan pengaruh dalam kehidupannya (dalam hal ini sekolah/kampus), sehingga aturan atau kebijakan yang dikeluarkan memberikan kesejahteraan terhadap hidup anak yang bersangkutan.

Untuk mengetahui hubungan antara keaktifan anak muda dalam berorganisasi terhadap partisipasi politik, dilakukan analisis *Chi Square* dengan penilaian kekuatan hubungan menggunakan koefisien Phi.

Tabel 3 Distribusi Responden Menurut Keaktifan dalam Organisasi dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

	Partisipasi Politik				Total		Koef. Phi	P value
	Rendah		Tinggi		n	%		
	n	%	n	%				
Kelompok A	72	55.5	138	44.5	310	100.0	0.135	0.010

POLITIK PEMILIH MUDA

Kelompok B	6	41.8	78	58.2	134	100.0
Kelompok C	3	41.1	33	58.9	56	100.0
Jumlah	251	50.2	249	49.8	500	100.0

Keterangan:

- Kelompok A: tidak mengikuti organisasi apa pun
- Kelompok B: menjadi anggota dalam organisasi baik tingkat sekolah/universitas, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau nasional
- Kelompok C: menjadi pengurus harian dalam organisasi baik tingkat sekolah/universitas, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau nasional
- P value < 0.05

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar anak muda yang tidak mengikuti organisasi apapun di sekolah atau universitasnya (kelompok A) memiliki partisipasi politik yang rendah, sedangkan sisanya memiliki partisipasi politik yang tinggi. Jika dilihat pada kelompok anak muda dengan keaktifan dalam organisasi sebagai anggota (kelompok B) dan kelompok anak muda dengan keaktifan dalam organisasi sebagai pengurus harian (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau ketua divisi) (kelompok C), didapatkan bahwa lebih dari 50% anak muda pada kedua kelompok tersebut justru memiliki partisipasi politik yang tinggi.

Meskipun jumlah anak muda dari kelompok B dan kelompok C yang memiliki partisipasi politik tinggi lebih sedikit dari jumlah anak muda dari kelompok A yang memiliki partisipasi politik baik rendah maupun tinggi, namun perbedaan yang dapat dilihat adalah proporsi dari perbandingan variabel yang diukur dari ketiga kelompok tersebut. Hasil uji statistic diperoleh *p value* = 0.010, dengan demikian terdapat perbedaan proporsi partisipasi politik antara anak muda yang tidak mengikuti organisasi apa pun (kelompok A), anak muda yang menjadi anggota di organisasi (kelompok B), dan anak muda yang menjadi pengurus harian di organisasi (kelompok C) (*p value* < 0.05).

Tingkat keanggotaan yang mencerminkan keaktifan seseorang dalam berorganisasi memiliki hubungan terhadap partisipasi politik anak muda. Dari hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa terdapat 13.5% (koef. Phi 0.135) kecenderungan anak muda untuk dapat berpartisipasi politik tinggi (memberikan suara dalam pemilihan, memberikan kritik terhadap kebijakan kampus, membuat petisi sebagai bentuk protes, ikut berkampanye, atau mengajukan dirinya sebagai calon ketua) dengan bergabung secara aktif dalam organisasi dibanding mereka yang tidak bergabung dengan organisasi apapun. Dapat dikatakan,

kegiatan berorganisasi memiliki nilai-nilai politik yang menjadi sebuah pembelajaran dan pemicu bagi seseorang untuk berpartisipasi politik.

Pada studi yang dilakukan oleh Prihatiningtias (1993) dan McFarland dan Thomas (2006), posisi dan tingkat partisipasi dalam organisasi jenis apapun dapat mendorong pemahaman politik dari anggotanya. Anak muda yang memiliki keaktifan dalam berorganisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik mereka pada saat dewasa. Berbeda dengan anak muda yang tidak aktif dalam organisasi, akan memiliki kecenderungan 5-10% lebih rendah untuk berpartisipasi politik secara aktif pada saat dewasa.

Dalam beberapa organisasi, terlihat bahwa penanaman pengetahuan politik juga dijalankan sehingga memberikan pengertian lebih lanjut bagaimana seorang anak muda dapat berpartisipasi politik dengan baik, seperti pendapat dari salah seorang aktivis dari organisasi tani di Riau,

“Dalam organisasi ini kami selalu memulai dengan pengetahuan politik, terdapat program pendidikan politik di dalam organisasi sehingga definisi ikut dalam politik tidak disalahkaprahkan hanya dengan mengikuti pemilu saja”¹⁹

Begitu juga pendapat pelajar dari Riau berikut,

“Kalau menurut saya dengan berorganisasi jadi punya masa depan, karena kita di sini belajar sosialisasi, belajar akar masalahnya, lalu kita mencari tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Selain itu karena di sini kita bisa belajar dengan senior-senior yang sudah punya pengalaman juga cara bersosialisasi dengan orang lain”²⁰

Keinginan untuk terlibat dalam berorganisasi didorong oleh kemampuan organisasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan aktual dari anggotanya, bukan sebuah politik yang begitu berjarak. Selain itu, wawasan itu juga memberikan kesempatan

¹⁹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan Christina Dwi Susanti terhadap aktivis Serikat Tani Riau (STR) pada Februari 2014

²⁰ Berdasarkan wawancara yang dilakukan Christina Dwi Susanti terhadap mahasiswa salah satu universitas di Riau pada Februari 2014

terhadap mereka dalam bertransformasi di masa depan. Kegiatan berorganisasi dianggap sebagai sebuah akses untuk melakukan mobilitas vertikal setelah mereka selesai menjalankan pendidikannya di sekolah. Organisasi yang mendorong anak muda untuk berpartisipasi politik pun tidak hanya sebatas organisasi yang berhubungan dengan politik saja, namun setiap organisasi yang menuntut keaktifan anak muda di dalamnya untuk mencapai tujuan dari masing-masing organisasi. Kegiatan anak muda dalam organisasi ini akan secara tidak langsung menanamkan nilai politik dalam proses keaktifan anak muda di dalamnya sehingga mereka dapat melakukan partisipasi politik yang lain di luar kegiatannya dalam organisasi.

Ikatan Keluarga

Penilaian ikatan keluarga berdasarkan World Value Survey (WVS) digunakan oleh Alesina dan Giulano (2009) untuk mengukur hubungannya terhadap partisipasi politik, dan Ljunge (2011) untuk mengukur hubungannya terhadap kebajikan publik (*civic virtues*). Yang menarik dari penelitian yang dilakukan Ljunge adalah penambahan dimensi tempat tinggal seseorang terhadap tempat tinggal keluarga. Apabila seseorang tinggal bersama orang tuanya, maka ikatan keluarga orang tersebut dinilai kuat, sedangkan apabila seseorang tinggal menyendiri jauh dari keluarga, maka ikatan keluarga orang tersebut dinilai lemah.

Dengan berdasar pada penelitian Alesina dan Giulano (2009) dan Ljunge (2011) yang menambahkan satu dimensi penilaian ikatan keluarga dalam penelitiannya, peneliti memberikan satu dimensi tambahan pada penelitian ini, yaitu topik apa yang sering dibicarakan dalam keluarga di waktu luang. Penambahan dimensi ini dirasa penting untuk mengetahui bahwa ikatan keluarga yang kuat tidak hanya berdasar pada seberapa penting nilai keluarga terhadap seseorang dan seberapa besar kepercayaan seseorang terhadap keluarga tanpa mengetahui topik apa yang dipercaya dapat didiskusikan dalam sebuah keluarga.

Diagram 14 Distribusi Responden Menurut Ikatan Keluarga Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

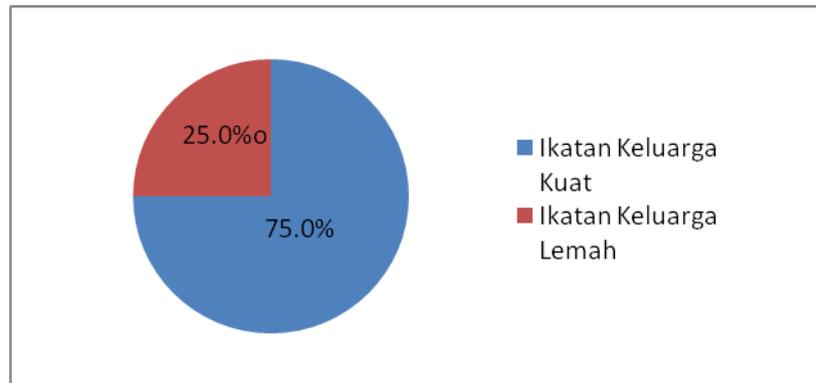
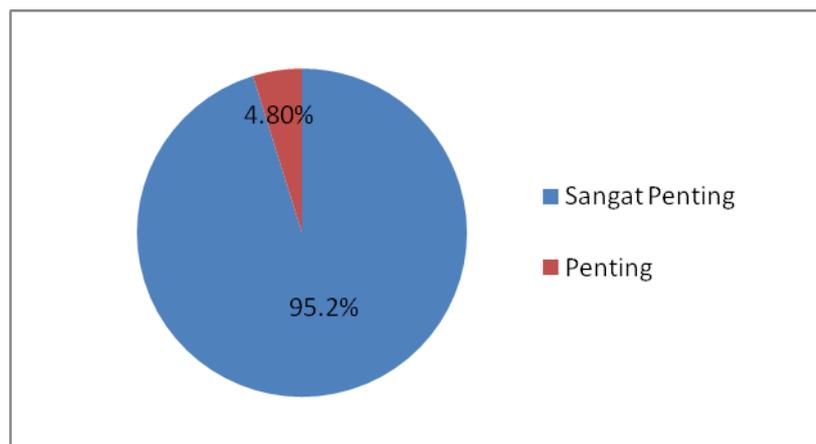


Diagram 8 memperlihatkan bahwa sebagian besar anak muda di lima kota cenderung memiliki ikatan keluarga yang kuat, sedangkan hanya sebagian kecil anak muda memiliki ikatan keluarga yang lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda menganggap keberadaan keluarga merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupannya. Selain itu, Keluarga juga memberikan kepuasan yang cukup bagi dirinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian World Values Survey yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara peringkat ke-7 dengan ikatan keluarga terkuat.

Diagram 15 Jawaban Pertanyaan “Seberapa Penting Peran Keluarga dalam Kehidupan Kamu?”



Dari Diagram 9 dapat dilihat bahwa hampir seluruh anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura cenderung merasa bahwa keluarga sangat penting dalam kehidupannya. Peran keluarga dirasa penting bagi anak muda dalam bentuk

hubungan yang mereka jalin dengan orang tua. Sebagaimana juga hasil temuan dari World Values Survey yang dilakukan pada tahun 2005 – 2009 di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ikatan keluarga terkuat. Diketahui, sebanyak 97.4% responden penduduk Indonesia menilai bahwa keluarga sangat penting bagi kehidupan mereka. Hanya sebesar 1.8% penduduk menilai bahwa keluarga cukup penting dalam kehidupan mereka.

Untuk mendukung pernyataan anak muda mengenai peran penting keluarga, analisis data yang dilakukan memperlihatkan bahwa terdapat 98.6% anak muda di 5 kota setuju terhadap pernyataan “terlepas dari seberapa baik orang tua dan apa pun kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua, seseorang harus selalu mencintainya dan menghormatinya”. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang merefleksikan ikatan keluarga yang kuat seperti dalam penelitian Alesina dan Giuliano (2009) dan Ljunge (2011). Hanya terdapat 1.4% anak muda yang setuju terhadap pernyataan “seseorang tidak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mencintainya orang tua jika ia merasa belum mendapatkan hormat dan cinta dari orang tua”. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda memiliki pemikiran bahwa orang tua memiliki peran yang besar dalam sebuah keluarga sehingga mereka wajib tetap menghargai dan menghormati orang tua, meski pernah terdapat kesalahan dari orang tua mereka.

Temuan lain yang mendukung penilaian kepentingan sebuah keluarga terhadap seorang anak dalam penelitian ini adalah didapatkan sebanyak 94.6% anak muda setuju dengan pernyataan “tugas orang tua adalah melakukan yang terbaik bagi anak-anak mereka bahkan dengan mengorbankan kesejahteraannya sendiri”, dan hanya 5.4% yang memilih pernyataan “orang tua memiliki kehidupan mereka sendiri dan tidak boleh diminta untuk mengorbankan kesejahteraan sendiri untuk anak-anak mereka”. Pernyataan pertama merupakan pernyataan yang merefleksikan ikatan keluarga yang kuat dari anak muda. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa anak muda menganggap ikatan yang dibangun antara orang tua dan anak adalah ikatan yang mengikat dalam kehidupan anak tersebut. Orang tua wajib menjaga kesejahteraan anaknya meski mengorbankan kesejahteraannya sendiri.

Diskusi Politik dalam Keluarga

Dalam ikatan keluarga, sosialisasi politik diukur dengan seberapa sering keluarga mendiskusikan politik di dalam kesehariannya. Sosialisasi politik sendiri merupakan suatu

proses pewarisan nilai dan sikap politik yang dilakukan dari satu orang ke orang lain dan dilakukan secara terus menerus (Almond, 1990). Proses tersebut akan memicu seseorang untuk mengkritisi keadaan politik yang terjadi dan dapat memberikan rangsangan pada orang tersebut untuk berpartisipasi politik secara aktif (Rush & Althoff, 1986). Untuk mengetahui seberapa sering anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura mendiskusikan pandangan politik dengan keluarganya, dapat kita lihat pada Tabel 4

Tabel 4 Distribusi Responden Menurut Intensitas Diskusi dalam Keluarga Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

Topik Diskusi	Intensitas				
	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Agama	7.8%	4.6%	12.4%	39.4%	35.8%
Moral	8.6%	5.6%	11.0%	41.2%	33.6%
Sosial	7.4%	5.0%	16.6%	40.0%	31.0%
Politik	19.0%	26.8%	32.4%	13.2%	8.6%
Seksualitas	35.2%	22.4%	18.6%	17.0%	6.8%
Kehidupan Sekolah/Kampus	4.6%	4.6%	15.4%	37.0%	38.4%
Pertemanan	11.8%	9.8%	21.4%	33.6%	23.4%
Ekonomi	9.6%	10.0%	23.2%	33.2%	24.0%

Keterangan:

- a. Jarang: 1-2 kali dalam 1 minggu
- b. Kadang-kadang: 2-3 kali dalam 1 minggu
- c. Sering: 3-5 kali dalam 1 minggu
- d. Sangat Sering: > 5 kali dalam 1 minggu

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa pembicaraan politik dalam keluarga tidak sering dilakukan oleh anak muda, hanya sebagian kecil anak muda di 5 kota yang sangat sering membicarakan politik di dalam keluarganya. Pembicaraan yang paling dominan dilakukan oleh anak muda adalah kehidupan sekolah/kampus, kemudian disusul dengan pembicaraan mengenai agama. Hal ini didasarkan bahwa penduduk Indonesia tidak menganggap bahwa politik adalah hal yang penting untuk dibicarakan. Menurut data World Values Survey (2005-2009), terdapat 41.1% responden menganggap bahwa politik adalah hal yang tidak terlalu

penting untuk dibicarakan, sedangkan hanya 10.7% dari responden menganggap hal tersebut sangat penting untuk dibicarakan.

Pembicaraan mengenai politik, terutama politik pemerintahan, menjadi satu isu yang dihindari oleh anak muda, terutama yang masih mengenyam pendidikan SMA/ sederajat, baik di rumah maupun di sekolah. Dari hasil *Focus Group Discussion* di Kota Cirebon, diketahui bahwa siswa SMA tidak begitu tertarik pada pembicaraan mengenai politik di dalam kelas. Hal ini diutarakan oleh salah seorang guru di SMK yang ada di Kota Cirebon sebagai berikut,

“Kalau saya mulai bicara politik, anak-anak langsung bilang “Jangan ngomongin politik di kelas dong Pak...””²¹

Anak muda tidak memiliki kesadaran mengenai pentingnya politik sebagai sebuah proses dalam kehidupan bersama. Mereka tidak memandang politik sebagai isu krusial dan berada dekat dengan kehidupan sehari-harinya.

Hubungan Ikatan Keluarga terhadap Partisipasi Politik

Alesiano dan Giuliano (2009) menyatakan bahwa individu dengan ikatan keluarga yang kuat secara konsisten memiliki ketertarikan yang rendah terhadap politik dan juga tidak memiliki minat yang besar untuk berpartisipasi dalam bentuk aktivitas politik apapun, mulai dari berdiskusi mengenai politik, bekerja secara sukarela untuk partai politik, sampai ke bentuk paling aktif dalam partisipasi politik, yaitu demonstrasi, penyerangan pemerintahan, atau menandatangani petisi. Penelitian Alesiano dan Giuliano menggunakan data dari World Values Survey dan melibatkan beberapa Negara di dalamnya. Bagaimana dengan anak muda di Indonesia sendiri?

²¹ Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* terhadap guru SMA/SMK dan dosen Universitas di Kota Cirebon pada tanggal 26 Februari 2014.

Tabel 5 Distribusi Responden Menurut Ikatan Keluarga dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

Ikatan Keluarga	Partisipasi Politik				Total		Koef. Phi	P value
	Rendah		Tinggi		N	%		
	n	%	n	%				
Rendah	67	53.6	58	46.4	125	100.0	0.039	0.439
Tinggi	184	49.1	191	50.9	375	100.0		
Jumlah	251	50.2	249	49.8	500	100.0		

P value > 0.05

Dari Tabel 5 didapatkan bahwa tidak ada hubungan berarti antara ikatan keluarga dengan partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, palu, dan Jayapura (*p value* > 0.05). Hal ini tentu tidak sejalan dengan hasil penelitian Alesiano dan Giuliano (2009). Hal yang mendasari fenomena ini mungkin saja dikarenakan cara penilaian partisipasi politik yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian Alesiano. Dalam penelitian Alesina, partisipasi politik (yang kemudian disebut sebagai sikap politik dalam penelitiannya) didapat dengan mengukur intensitas diskusi politik yang dilakukan antar teman, intensitas aktivitas individu dalam pekerjaan sukarela terhadap partai politik, tingkat ketertarikan individu terhadap politik, dan tindakan politik apa yang pernah diambil oleh individu. Secara garis besar, seluruh dimensi pertanyaan mengenai partisipasi politik yang digunakan oleh Alesina dan Giuliano ada dalam pertanyaan untuk mengukur partisipasi politik anak muda dalam penelitian ini, namun pada penelitian Youth Rights Now ini, partisipasi politik diukur dengan menambahkan dimensi akses dari sekolah atau kampus terhadap bentuk sikap politik yang akan dilakukan siswa atau mahasiswanya. Dengan demikian, dimensi ini akan mengontrol total nilai akhir dari dimensi lain dalam pertanyaan partisipasi politik yang diajukan.

Hasil lain yang didapatkan dalam penelitian Alesina dan Giuliano (2009) adalah bahwa individu dengan ikatan keluarga yang kuat berasosiasi dan mungkin menjadi penyebab adanya ketidakpercayaan publik. Temuan ini tidak mendukung apa yang dihasilkan oleh penelitian Ljunge (2011), yang sama-sama bertujuan menguji teori Banfield (1959) mengenai keluarga amoral, yang menyatakan bahwa individu dengan ikatan keluarga yang kuat memiliki asosiasi positif terhadap kebajikan publik dan cenderung

mendorong sikap positif dalam kelompoknya demi kesuksesan komunitas. Ljung juga lebih lanjut membantah teori Banfield mengenai keluarga amoral yang dipicu dari ikatan keluarga yang kuat.

Dalam temuannya, ikatan keluarga yang kuat justru mendorong individu untuk menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupannya dengan menolak segala bentuk kecurangan, korupsi, dan aktivitas lain yang menguntungkan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan pengaruh ikatan keluarga bisa saja berubah-ubah dari satu masa ke masa lain. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Alesina dan Giuliano lainnya yang menjelaskan bahwa ikatan keluarga bukanlah satu-satunya faktor yang akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara ikatan keluarga anak muda terhadap partisipasi politik mereka. Keluarga tidak memberikan dorongan yang berarti bagi keaktifan partisipasi politik seseorang, tidak juga memberikan tekanan bagi orang tersebut untuk tidak aktif berpartisipasi politik. Dalam penelitian Kurniawan (1994) dan Prihatiningtias (1993), diperlihatkan bahwa bukan ikatan keluarga yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, melainkan urutan dalam keluarga. Dalam kedua penelitian tersebut didapatkan bahwa dengan menjadi anak sulung, terdapat kecenderungan bagi anak tersebut untuk lebih aktif berpartisipasi politik dibanding urutan lainnya. Keduanya menjelaskan bahwa anak sulung atau tunggal mendapatkan perhatian yang lebih dari kecil sehingga memiliki kecenderungan untuk bersikap otoriter ketika sudah dewasa, dan karenanya, ia akan menjadi lebih aktif untuk mengambil keputusan dan dalam partisipasi politik. Hal ini bukan berarti anak muda harus menjadi anak sulung terlebih dahulu untuk memiliki partisipasi politik yang tinggi, dan bukan berarti anak bungsu selamanya akan memiliki partisipasi politik yang lebih rendah dibanding kakaknya. Partisipasi politik seseorang banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seorang anak bungsu yang aktif dalam organisasi, memiliki pengetahuan HAM yang baik, dan terpapar dengan media secara intens bisa saja memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi dibanding seorang anak sulung tanpa hal-hal terkait.

Demokrasi Media Dan Media Demokrasi

Light, Keller, dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (radio, televisi, film, internet)

merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Cangara (2006) mengatakan bahwa media tersebut memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: (1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yaitu mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi, (2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima, (3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan, (4) Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya, (5) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja. Namun dalam konteks perkembangan teknologi, karakteristik kedua sudah tidak terlalu relevan lagi karena penggunaan internet yang semakin umum membuat komunikasi dua arah selalu mungkin untuk terjadi.

Light, Keller, dan Calhoun kemudian mengidentifikasi media massa sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. Hal ini ditimbulkan karena media massa dipandang dapat meningkatkan kohesi sosial dengan menyajikan standardisasi yang lebih atau kurang ataupun sama mengenai sebuah budaya melalui adanya komunikasi massa. Namun pada konteks hari ini, internet membuat setiap orang menjadi media massa itu sendiri sehingga potensi setiap orang menjadi agen sosialisasi menjadi semakin besar. Agen sosialisasi yang dahulu dibayangkan didominasi oleh radio, koran, dan televisi saja sudah menjadi lebih cair.

Robert Park (1922) memberikan sebuah contoh bagaimana media massa mampu menjadi agen bagi masyarakat untuk mendefinisikan lingkungan sekitarnya. Imigran-imigran di Amerika Serikat dapat menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan baru lewat pembelajaran-pembelajaran mengenai opini publik mengenai mereka di dalam koran-koran yang setiap hari mereka baca. Hal ini juga terjadi di Indonesia ketika masa krisis ekonomi 1997, dimana media massa menganggap krisis ekonomi tersebut sebagai sebuah persoalan moneter. Pada saat itu, kata "krismon" atau krisis moneter menjadi begitu populer. Saat bersamaan, banyak analis yang juga melihat bahwa krisis terjadi akibat kebijakan negara yang keliru dalam membangun orientasi ekonomi. Namun, isu tersebut tidak muncul karena tidak ada media yang berani mengkritik secara terang-terangan kebijakan ekonomi Orde Baru. Dua contoh ini dapat membantu kita untuk memahami media sebagai agen sosialisasi yang mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam mendefinisikan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks demokratisasi yang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, keberadaan media menjadi sangat penting. Anak muda yang menjadi fokus tema dari penelitian ini tentunya juga merasakan peran vital dari keterbukaan akses dan informasi melalui media-media tersebut. Hal tersebut tentunya juga dapat mempengaruhi mereka di dalam mendefinisikan lingkungan sekitar dan kepentingan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut, media massa dapat dijadikan sebagai salah satu variabel yang memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik yang dimiliki oleh anak muda.

Media Sebagai Ruang Politik

Dalam era media masa yang begitu terbuka, anak muda Indonesia sudah mulai menjadikan berbagai jenis media untuk konsumsi sehari-harinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura memperlihatkan bahwa akses anak muda terhadap media cenderung rendah, tetapi pemanfaatan media massa memiliki pengaruh tersendiri dalam partisipasi politik anak muda di lima kota ini.

Tabel 6 Distribusi Responden Menurut Keterpaparan Media dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, dan Jayapura

Partisipasi Politik		Keterpaparan Media		Total
		Rendah	Tinggi	
Rendah	n	143	108	251
	%	56.7%	43.5%	50.2%
Tinggi	n	109	140	249
	%	43.3%	56.5%	49.8%
Total	n	252	248	500
	%	100.0%	100.0%	100.0%

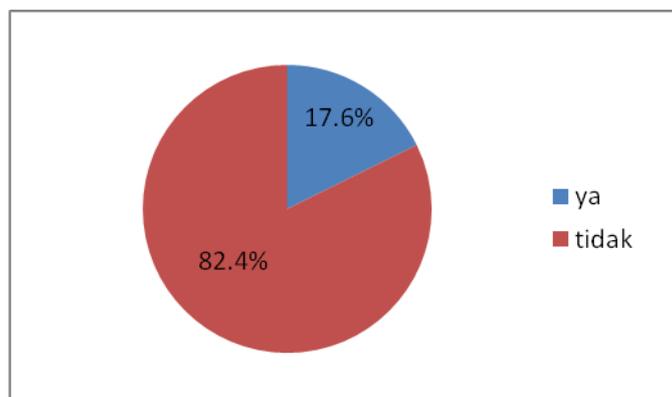
Keterpaparan media memiliki hubungan dengan partisipasi politik anak muda di lima wilayah, dimana analisis tabel silang memperlihatkan bahwa semakin tinggi keterpaparan media mempengaruhi tingginya partisipasi politik. Berdasarkan studi yang diajukan oleh Park, anak muda yang semakin banyak terpapar media memiliki kemampuan yang semakin besar juga untuk mendefinisikan kebutuhannya untuk berpartisipasi secara politik. Studi ini memperlihatkan bahwa media masa memiliki peran vital di dalam kehidupan anak muda di lima kota yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 7 Analisis Hubungan antara Keterpaparan Media terhadap Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

				Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal	by	Somers' d	Symmetric	.132	.044	2.977	.003
Ordinal			Partisipasi Politik Dependent	.132	.044	2.977	.003
			Media Dependent	.132	.044	2.977	.003

Dari pengukuran hubungan, aktivitas media massa memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik anak muda di lima kota. Arah hubungan tersebut menunjukkan angka positif. Semakin tinggi akses media membuat partisipasi politik juga semakin tinggi. Walaupun hubungan tersebut masih sangat kecil, hal ini memperlihatkan sebuah potret bagaimana media massa masih memiliki kontribusi di dalam kehidupan politik anak muda, meski tidak sampai berpartisipasi secara aktif. Dalam FGD mahasiswa di Palu, aktivitas politik anak muda berjalan masih dengan cara yang sangat konvensional, dimana anak-anak muda masih menganggap demonstrasi sebagai satu-satunya ekspresi yang tepat untuk bersuara secara politis. Sementara itu, media sosial belum dipandang sebagai instrument perubahan sosial yang dapat mengangkat sebuah isu lokal menjadi isu nasional ataupun internasional. Hal ini menunjukkan kesadaran ruang politik anak muda di Palu masih sebatas hubungan antar kampung.

Diagram 16 Distribusi Responden Menurut Penggunaan Media Sosial Untuk Melakukan Kritik Kepada Kebijakan Pemerintah di Palu.



Berdasarkan temuan studi ini, hanya terdapat 22 % anak muda Palu yang pernah memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah. Dari semua anak muda Palu yang pernah mengkritik kebijakan pemerintah tersebut, hanya sekitar 17.6% anak muda yang menggunakan Media sosial menjadi instrumen dalam melakukan kritik. Padahal, kesempatan tersebut begitu terbuka untuk dilakukan di media sosial, dimana aksesnya tidak sesulit televisi, radio, ataupun koran. Meskipun angka tersebut masih sangat rendah, instrumen sosial media masih lebih tinggi daripada jenis media lainnya. Pemanfaatan media mainstream tidak mampu dilakukan oleh anak muda karena memang begitu banyak kepentingan yang sering kali dengan kebutuhan anak muda di media-media tersebut. Selain itu, anak-anak muda memang tidak terbiasa dengan iklim menulis di media. Hal ini diceritakan oleh seorang wartawan dari salah satu media besar di Palu yang meminta namanya disamarkan.

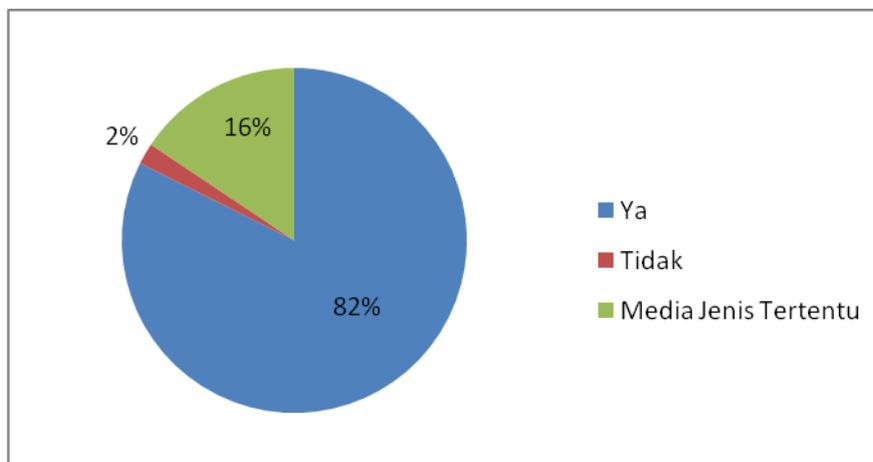
Studi ini juga menemukan bahwa uniknya partisipasi politik anak muda di Cirebon. Mereka kerab bermain dan bermediasi dengan pemerintah di dalam isu-isu yang sensitif dan berskala internasional. Misalnya, mereka banyak terlibat dalam pembahasan dan demonstrasi isu sumber daya alam dan korporasi internasional. Demonstrasi digunakan sebagai instrumen utama dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Daerah-daerah lain menganggap demonstrasi sudah tidak relevan di dalam advokasi kepentingan politik mereka, namun temuan Cirebon memperlihatkan angka yang signifikan. Anak muda Cirebon masih menganggap ini sebagai suatu metode partisipasi yang masih kontekstual saat ini. Namun, Cirebon memperlihatkan bahwa penggunaan media massa sebagai wahana untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah masih sangat minim.

Produk Media untuk Anak Muda

Media massa merupakan sumber informasi utama dari anak muda. Hal ini diperlihatkan dari data di bawah ini, dimana sebagian besar anak muda menjadikan semua jenis media massa sebagai rujukan informasi mereka. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa anak muda memiliki kebutuhan yang besar akan informasi-informasi yang diberikan oleh media massa. Walaupun belum mencapai semua pelosok daerah, pemerataan akses semua

jenis media massa sudah mulai dilakukan pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-darah sekitar pusat pemerintahan di Indonesia.

Diagram 17 Distribusi Responden Menurut Penggunaan Media sebagai Sumber Informasi Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura



Anak muda cenderung menggunakan semua media sebagai sarana untuk mengonsumsi informasi. Jumlah pengguna media tertentu saja tidak memperlihatkan angka yang besar. Berdasarkan FGD di beberapa kota, hal ini menjadi sebuah kekhawatiran dari banyak aktor, termasuk guru/dosen dan pejabat daerah terhadap perubahan perilaku anak muda. Guru, dosen, dan pejabat daerah menganggap bahwa media massa sebagai sebab utama kemerosotan moral dari generasi muda. Namun, hal ini dapat menjadi kontraproduktif dengan semakin banyaknya kesempatan yang didapatkan oleh anak muda dengan keterbukaan tersebut, seperti akses mendapat informasi politik, pekerjaan, dan referensi bacaan.

Responden yang mengakses televisi dengan durasi yang tinggi di semua kota menunjukkan angka yang kecil. Rata-rata berada di angka sekitar 12% anak muda yang mengakses televisi melebihi enam jam dalam sehari. Di sisi lain, terdapat variasi dari setiap wilayah dalam durasi penggunaan internet. Dibanding Palu dan Jayapura, pengguna internet dengan durasi yang tinggi di tiga kota lainnya memperlihatkan angka yang cenderung lebih tinggi. Sementara itu, akses media televisi dan internet di lima kota memiliki kecenderungan yang sama, yaitu cenderung sedang (3-6 jam/hari).

Selain dimensi mengenai intensitas/durasi, penelitian ini juga menyoroti apa-apa saja konten dari konsumsi media anak muda di lima kota. Isu keagamaan, olah raga, sinetron, dan musik menjadi konten yang cenderung sering diakses oleh anak muda di televisi dan internet. Kebutuhan terhadap konten tersebut didorong oleh kedekatan anak-anak muda dengan isu yang sedang dibicarakan. Seperti di dalam teori-teori mengenai kelompok kecil, anak muda kerap kali berkelompok menurut kegemaran dan kemampuan dalam mengonsumsi budaya. Hal ini muncul dengan begitu eksplisit dalam FGD siswa dan mahasiswa di hampir semua wilayah.

“Biasanya kita temanan karena sama-sama suka korea dan itu yang tidak nonton korea tidak bisa temanan” –siswa Palu

Selain itu, konten yang diakses menjadi salah satu faktor pendorong anak muda untuk mendefinisikan bagian dari dirinya atau bukan bagian dari dirinya. Hal ini memperlihatkan begitu kuatnya media massa memberikan pengaruh sosial pada anak muda.

Dalam studi yang lain, Gerbner dan Gross (1976)²² melihat bahwa konsumen televisi yang lebih intens, merefleksikan realita simbolik yang ada di dalam televisi dengan lebih baik dibanding mereka yang mengonsumsi media dengan intensitas lebih sedikit. Apabila dilihat pada hasil studi ini, rendahnya partisipasi politik anak muda merefleksikan sebuah realitas mengenai tontonan televisinya. Informasi-informasi mengenai pentingnya politik bagi kegiatan-kegiatan yang mereka sedang jalani tidak tersedia di dalam media masa. Aspirasi politik dari kelompok anak muda pun tidak tertangkap oleh media massa.

Anak Muda Yang Berjarak Dengan Media untuk kepentingan Politik

Pada bagian sebelumnya, studi ini sudah mengulas bagaimana anak muda melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui sosial media. Pada pembahasan tersebut, anak muda cenderung tidak menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kritik kepada kebijakan pemerintah. Sosial media dianggap sebagai sebuah

²² Penelitian yang dilakukan George Gerbner di Amerika Serikat untuk melihat fakta bahwa acara televisi merupakan acuan budaya di masyarakat Amerika.

saluran yang sangat personal, tanpa implikasi transformasi yang besar. Sehingga, mereka merasa sangat risih menyuarakan kepentingan politik dalam media sosial.

“Ya anak-anak di fb atau twitter itu galau terus tiap malam, kita guru-guru ini sering coba hibur, biar mereka juga merasa makin dekat sama gurunya” -

Ungkap seorang Guru di Jakarta

Namun, momen tertentu pasti dapat mendorong anak muda untuk menyuarakan isu politik di sosial media, mengingat aktivitasnya sebenarnya sudah cukup besar.

Di sisi lain, penting untuk mempertanyakan apakah anak muda menggunakan akses untuk mengonsumsi isu politik melalui berbagai media. Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan kepada konsumsi isu politik anak muda melalui media masa yang mereka gunakan.

Tabel 8 Distribusi Responden Menurut Akses Konten Politik di Televisi terhadap Kegiatan memberikan Saran/Kritik pada Kebijakan Pemerintah

Akses Konten Politik		Memberikan Saran/Kritik pada Kebijakan Pemerintah		Total
		Ya	Tidak	
Sangat Sering	n	29	41	70
	%	21.8%	11.5%	14.3%
Sering	n	39	75	114
	%	29.3%	21.0%	23.3%
Kadang-kadang	n	37	109	146
	%	27.8%	30.5%	29.8%
Jarang	n	15	90	105
	%	11.3%	25.2%	21.4%
Tidak Pernah	n	13	42	55
	%	9.8%	11.8%	11.2%
Total	n	133	357	490
	%	100.0%	100.0%	100.0%

Tabel silang di atas memperlihatkan bahwa anak muda yang sangat sering menonton acara politik cenderung pernah memberikan kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, kelompok yang tidak pernah menonton berita politik cenderung tidak pernah memberikan kritik terhadap pemerintah. Namun dari uji hubungan yang dilakukan, pengaruhnya terlihat sangat lemah. Konten politik yang semakin sering dikonsumsi oleh anak muda tidak serta

merta membuat mereka memberikan kritik lewat sosial media. Hal ini dapat berarti penggunaan media sosial sebagai alat politik yang tidak lazim bagi anak muda. Isu-isu personal lebih dominan mengisi sosial media mereka. Kesadaran mengangkat isu publik lewat sosial media merupakan hal yang tidak familiar bagi mereka. Anak muda yang menggunakan belum berubah menjadi anak muda itu sendiri.

Dari data temuan setiap daerah, anak muda di empat wilayah memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sering mengakses konten politik. Namun, Palu menjadi pengecualian karena data menunjukkan bahwa anak muda Palu cenderung tidak pernah mengakses konten politik di media masa. Hal ini juga terlihat dalam FGD yang dilakukan di kota Palu. Mereka cenderung menilai mahasiswa di Kota Palu sangat “apatis” dengan isu-isu politik dan masalah sosial di sekitar. Di sisi lain, perilaku konsumtif terus difasilitasi oleh keberadaan swalayan-swalayan. Beberapa aktivis mengatakan bahwa jumlah mall dan tempat-tempat hiburan anak muda lebih banyak daripada jumlah toko koran, apalagi toko buku. Banyak dari mereka yang mengisi waktu luang di pusat perbelanjaan-perbelanjaan yang tersedia. Sehingga, kepedulian terhadap isu-isu politik dan sosial hanya untuk segelintir anak muda saja.

Anak muda cenderung tidak memiliki akses terhadap media, selain internet dan televisi. Dari hasil setiap daerah, anak muda cenderung jarang mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Anak muda justru merasa sulit untuk mengakses kedua hal tersebut. Misalnya, mereka merasa tidak begitu berminat untuk membaca surat kabar karena substansinya terlalu serius dan membosankan. Selain itu, radio cenderung lebih sering didengarkan oleh orang-orang yang menggunakan mobil karena aksesnya dirasa lebih mudah. Padahal, radio di Indonesia memiliki tradisi yang panjang dalam mendorong tren tertentu bagi anak muda. Kota Jakarta yang banyak memiliki anak muda kelompok menengah atas yang memiliki mobil pribadi sebagai moda transportasi utama, radio masih menjadi instrumen komunikasi yang efektif karena mereka banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan radio saat terjebak macet. Hal ini memperlihatkan adanya keterbatasan anak muda dalam mendapatkan akses informasi di lima kota.

Tabel 9 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Keterpaparan Media, dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

			Keterpaparan Media	
			Rendah	Tinggi
Laki-laki	Partisipasi Politik	Rendah	46.4%	40.9%
		Tinggi	53.6%	59.1%
Perempuan		Rendah	66.9%	45.7%
		Tinggi	33.1%	54.3%

Tabel silang di atas memperlihatkan bahwa adanya kecenderungan yang berbeda antara responden laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki tidak memiliki perbedaan antara yang akses medianya tinggi dan yang rendah dalam partisipasi politik. Sementara itu, kelompok perempuan memperlihatkan kecenderungan sebaliknya. Temuan ini berbeda dengan pemaparan secara keseluruhan yang memperlihatkan hubungan positif di antara akses terhadap pemanfaatan media dan partisipasi politik. Ketika di lihat pada jenis kelamin tertentu, perbedaannya terlihat jelas. Ada konstruksi gender yang mempengaruhi cara pemanfaatan media pada partisipasi politik anak muda. Perempuan yang memiliki akses media tinggi cenderung lebih memanfaatkan itu sebagai peluang partisipasi politik. Hal ini didorong oleh kecilnya kesempatan partisipasi politik perempuan dalam budaya patriarki sehingga mereka tidak menyalakan kesempatan yang mereka dapatkan.

Di sisi lain, data ini memperlihatkan bahwa perempuan menjadi lebih rentan terpengaruh oleh isu-isu politik yang ada di media masa. Misalnya, perempuan akan lebih mudah tersentuh dengan kampanye-kampanye politik di media masa. Hal itu tidak berlaku pada laki-laki. Kelompok laki-laki cenderung lebih skeptis terhadap apa-apa yang diberitakan di media. Hal ini memperlihatkan bahwa sebuah kecenderungan konstruksi gender yang patriarkis masih sangat bekerja di masyarakat Indonesia. Laki-laki tampak lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh, sementara perempuan lebih mudah dipengaruhi secara emosional, seperti halnya masyarakat yang patriarkis secara sosiokultural. (Fakih, 1997) Konstruksi gender yang berpihak kepada laki-laki masih bekerja dengan sangat baik di lima kota dimana studi ini dilakukan. Penyelesaian persoalan ini harus menjadi agenda gerakan hak asasi manusia dan agenda-agenda kebijakan publik.

Tabel 10 Distribusi Responden Menurut Status Sosial Ekonomi, Keterpaparan Media, dan Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

		Keterpaparan Media	
		Rendah	Tinggi
SSE Rendah	Rendah	73,3%	40%
	Tinggi	26,7%	60%
SSE Tinggi	Rendah	64,3%	34,8%
	Tinggi	35,7%	65,2%

Dari tabel di atas dapat kita lihat, tidak ada beda antara kelompok yang memiliki status sosial ekonomi rendah dan status ekonomi tinggi. Memang di mata demokrasi tidak ada perbedaan mengenai kelas manapun, namun realitas sosial-ekonomi menghadirkan berbagai ketimpangan yang sering kali berdampak politis. (Winters, 2014) Namun pada kedua kelompok ini, hubungan antara akses media dengan partisipasi politik terlihat positif. Semakin tinggi akses terhadap media, semakin tinggi juga partisipasi politiknya. Hal ini terlihat juga berlaku sebaliknya. Tidak ada beda hubungan antara keterpaparan media dan partisipasi politik pada kelas bawah dan atas. Penjelasan dari data ini dapat dipengaruhi oleh akses internet dan televisi dari masing-masing kelas sosial tidak jauh berbeda. Selain itu, mereka semua cenderung paling lama menggunakan media yang serupa. Artinya, kelas bawah dan atas cenderung tidak ada beda. Mereka sama-sama memiliki kemungkinan untuk dimobilisasi oleh isu-isu yang muncul di media.

KESIMPULAN

Pengaruh Keterpaparan Pengetahuan HAM Sebagai Yang Terkuat

Pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) didapatkan siswa SMA dalam pelajaran kewarganegaraan, dan bagi beberapa mahasiswa mendapatkannya dalam pelajaran sejenis yang tidak menjadi pelajaran wajib dalam universitasnya. Galston (2001) mendeskripsikan pentingnya pendidikan mengenai kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan mengenai kewarganegaraan dapat mendukung nilai demokrasi seseorang. Semakin seseorang memahami demokrasi lewat pendidikan kewarganegaraan, semakin besar dukungan orang tersebut terhadap demokrasi pemerintah yang dimulai dengan nilai toleransi yang diajarkan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang diajarkan dalam mata ajaran tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa faktor keterpaparan pengetahuan mengenai HAM memiliki hubungan yang signifikan terhadap

partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura (P value < 0.05). Terdapat kecenderungan sebesar 15.6% bagi anak muda yang terpapar terhadap pengetahuan HAM untuk dapat berpartisipasi politik lebih aktif dibanding anak muda yang tidak terpapar pengetahuan sejenis. Lantas, apakah keterpaparan seseorang terhadap pengetahuan HAM menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik anak muda?

Tabel 11 Permodelan Akhir Analisis Multivariat Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap Partisipasi Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura

	B	S.E	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95.0% CI for Exp(B)	
							Lower	Upper
Usia			47.393	2	.000			
Usia (1)	1.330	.213	39.086	1	.000	3.779	2.491	5.734
Usia (2)	1.325	.298	19.771	1	.000	3.761	2.098	6.744
Media	.505	.193	6.856	1	.009	1.657	1.135	2.419
Keterpaparan Pendidikan HAM	.561	.194	8.373	1	.004	1.752	1.198	2.562
Constant	-2.213	.429	26.631	1	.000	.109		

P value < 0.05

Tabel 11 merupakan tabel permodelan akhir dari analisis regresi logistik yang dilakukan dengan menampilkan 3 variabel yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap partisipasi anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura, yaitu variabel usia, media, dan keterpaparan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Variabel ikatan keluarga tidak masuk dalam proses permodelan multivariate karena memiliki P value > 0.05.

Keterpaparan pendidikan HAM memiliki nilai kecenderungan yang lebih besar daripada variabel lainnya. Anak muda yang terpapar dengan pendidikan HAM akan memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak terpapar pendidikan sejenis. Pengetahuan Hak Asasi Manusia yang didapatkan siswa lewat pelajaran kewarganegaraan adalah salah satu bentuk pengetahuan yang menjadi pemicu siswa untuk memiliki sikap kritis dan untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Seperti apa yang dikatakan oleh Galston (2001), pengetahuan kewarganegaraan membantu masyarakat untuk mengetahui

kebutuhan individu dan juga kelompok. Keterpaparan ini menunjang sebuah masyarakat untuk membangun budaya demokrasi.

Saward (1994) beranggapan bahwa demokrasi yang dijalankan dalam sebuah negara harus memenuhi beberapa kondisi, diantaranya adalah kondisi kebebasan dasar, yaitu kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, berasosiasi, mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan beribadah seseuai dengan kovenan internasional hak sipil dan politik tahun 1966. Kondisi selanjutnya adalah kondisi partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, hak informasi dari pihak pemerintah, dan hak sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan yang berisi pengetahuan demokrasi seperti inilah yang cenderung mendorong siswa untuk aktif dalam mendukung kebajikan publik (*pubic virtue*) karena sesuai dengan hak asasi manusia.

Pengetahuan mengenai HAM ini pun dirasa penting sebagai sebuah gagasan yang membantu anak muda dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Selain itu, gagasan HAM yang sudah mereka miliki dapat mendorong mereka dalam melahirkan kreasi-kreasi dan menghadirkan diri di masyarakat.

*"Pelajaran HAM itu penting, misalnya kan di jurusan gua dididik untuk jadi seniman, ya hal ini berkaitan dengan karya yang kita hasilkan, karena ini hak kita dalam mengekspresikan diri"*²³

Hal ini sejalan dengan pendapat seorang dosen di Jakarta mengenai pendidikan Hak Asasi Manusia yang seharusnya diterapkan di setiap sekolah,

"Pengertian dan pemahaman HAM dan demokrasi seharusnya tidak hanya ada di pelajaran PKN (kewarganegaraan) saja, harus ada di semuanya. Penerapan pemahaman HAM dan demokrasi gak harus diajarkan dalam satu mata ajar, menurut saya itu gak efektif, malah jadi beban. Siswa bisa dapet nilai 10 tapi action-nya gak ada karena orientasinya hanya nilai, bukan praktik. Pendidikan di Indonesia juga seharusnya sudah berbasis HAM yang dikenal dengan 4A; availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Bukan hanya

²³ Berdasarkan wawancara Indah Yusari terhadap mahasiswa IKJ di Jakarta pada Februari 2014

siswa/mahasiswanya saja yang mengerti, tapi guru/dosennya juga harus mengerti. Kalau sudah diterapkan, pendidikan berbasis HAM tadi, anak-anak bisa ikut pemilu secara kritis, walaupun gak milih, bukan berarti mereka gak punya hak untuk memantau pemerintahan.”²⁴

Pengetahuan HAM akan menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan partisipasi politik baik di lingkungan sekitarnya, maupun berpartisipasi politik di ranah pemerintahan. Bagi seorang siswa atau mahasiswa, pengetahuan HAM menjadi salah satu pemicu bagi mereka untuk berpartisipasi politik dalam organisasi yang ada di sekolah atau universitasnya, dan tidak terbatas sampai di sana saja, siswa atau mahasiswa yang terpapar terhadap pengetahuan mengenai HAM akan memiliki kecenderungan untuk 2 kali lebih aktif berpartisipasi politik dalam bentuk lain, seperti mengisi atau membuat petisi terhadap pihak sekolah/kampus/pemerintah kota serta memberikan saran atau kritik terhadap kebijakan sekolah/kampus/pemerintah kota. Pengetahuan HAM ini juga mendorong siswa atau mahasiswa untuk berpartisipasi politik secara positif, melaksanakannya berlandaskan HAM yang telah ia ketahui dari pendidikan HAM yang mereka terima, dan mendukung kebijakan publik.

Keterbatasan Penelitian

1. Meskipun dalam penelitian ini peneliti menemukan data bahwa keterpaparan HAM yang ada di sekolah dan universitas rendah, namun peneliti tidak melakukan pengkajian lebih dalam mengenai konten Hak Asasi Manusia yang ada di buku teks pelajaran baik pelajaran SMA maupun universitas, sehingga peneliti tidak dapat secara subjektif berkata bahwa keterpaparan anak muda terhadap pengetahuan HAM yang rendah ini hanya semata-mata dikarenakan oleh metode pengajaran yang minim, padahal bisa saja konten mengenai HAM yang ada di buku pelajaranlah yang kurang memadai.
2. Dalam proses pengambilan data, peneliti berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu ahli pendidikan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia sudah berdasarkan undang-undang pendidikan yang sudah diratifikasi menjadi kurikulum

²⁴ Berdasarkan wawancara Indah Yusari terhadap salah satu dosen universitas di Jakarta pada Februari 2014.

berbasis hak. Namun sayangnya, peneliti tidak melakukan kajian lebih dalam untuk mencari penjelasan rinci dari ratifikasi undang-undang itu sendiri dan bentuk kurikulum seperti apa yang disebut sebagai kurikulum pendidikan berbasis hak.

3. Meskipun di awal penelitian sudah direncanakan untuk melaksanakan penelitian ini kepada responden dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, namun sayangnya di proses pengambilan data, enumerator di salah satu kota tujuan tidak merekrut responden secara *gender balance*, sehingga secara keseluruhan perbandingan antara responden laki-laki dengan responden perempuan tidak 1:1. Hal ini dikarenakan pengawasan peneliti utama terhadap enumerator di daerah tujuan tidak dapat dilaksanakan secara actual.
4. Meskipun penelitian ini sangat berkaitan dengan undang-undang pendidikan dan undang-undang hak asasi manusia, namun sayangnya penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai undang-undang terkait, sehingga penelitian ini belum bisa memunculkan rekomendasi untuk melaksanakan revisi undang-undang jika ditemukan poin dalam undang-undang yang merugikan anak muda sebagai subjek partisipasi politik dan juga subjek pendidikan di Indonesia.

Rekomendasi

1. Dibutuhkan pendidikan mengenai HAM untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura. Tidak hanya pengetahuan politik, namun sebuah pendidikan yang berisi penjelasan mengenai demokrasi dan pengagungan nilai-nilai HAM sehingga partisipasi politik yang dilakukan anak muda adalah partisipasi yang positif dan mendukung kebenaran publik.
2. Diperlukan adanya penelitian lanjutan yang merujuk pada penelitian ini untuk melihat bentuk kurikulum berbasis hak yang (menurut penuturan salah satu sumber) sudah diterapkan di Indonesia. Dibutuhkan penelitian yang mengkritisi undang-undang terkait pendidikan dan hukum hak asasi manusia sehingga UU terkait dapat mengalami perbaikan jika ada kekurangan di dalamnya.

Referensi

1. Alesina, Alberto and Paola Giuliano. (2009). Family Ties and Political Participation. *IZA Discussion Paper No. 4150*. United State of America.
2. Almond, G.A. and S. verva. (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara* terj. Sehat Simeamora. Jakarta: Bumi Aksara.
3. Anonimous. (2014). Most Young Lack Interest in Politics-Official Survey. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-26271935>
4. Assifa, Farid. (2013). Siswa SMA di Prabumulih Wajib Tes Keperawanan. <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/26/063457131/2-Kesalahan-IPDN-Versi-Keluraga-Praja-yang-Tewas>
5. Aulia, R. Ali. (1999). *Bentuk-bentuk Partisipasi Politik dan Dimensi Alienasi Politik Mahasiswa*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
6. Barner-Barry, Carol and Robert Rosenwein. (1985). *Psychological Perspectives on Politics*. USA: Prentice Hall.
7. Cahyo, Ratno Nur. (2014). Jumlah Pemilih Pemilu 2014 Pemuda Kuasai 40% Suara. <http://www.pemilu.com/berita/2014/02/jumlah-pemilih-pemilu-2014-pemuda-kuasai-40-persen-suara/>
8. Conway, Margaret M. (1991). *Political Participation in the US Washington DC: Congressional Inc. (2nd Edition)*. United State of America.
9. Delores, Jacques et al. Learning: The Treasure Within. *Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First CENTURY*. UNESCO.
10. EuropeAid. (2009). *Human Rights and Democracy, Fostering the Next Generation of Human Rights Leadership in Israel*.
11. Fournier, Bernard and Min Reuchamps. (2008). Youth Political Interest, Political Participation, and Civic Education in French-Speaking Belgium. *Young People's Political Participation, Civic Education and Political Participation Workshop*. Universite de Montreal.
12. Galston, William A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. *Annual Review of Political Science*. United State of America: University of Michigan. (4) pp 217-234
13. Hidayat, Mansyur. (2013) Protes Kepala Sekolah yang Kasar, Siswa SMP di Garut Mogok Belajar. <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/26/063457131/2-Kesalahan-IPDN-Versi-Keluraga-Praja-yang-Tewas>
14. Institute of Research Conflict. (2006). *Youth Participation in Democratic Process*. Ireland: Institute of Research Conflict
15. Jusuf, Isa Anshar. (2013). 2 Kesalahan IPDN Versi Keluarga Praja yang Tewas. <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/26/063457131/2-Kesalahan-IPDN-Versi-Keluraga-Praja-yang-Tewas>
16. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Diterbitkan oleh Kontras.
17. Kurniawan, Ova. (1994). *Faktor-faktor Sosial yang Mempengaruhi Pengetahuan, Sikap, dan Partisipasi Politik mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UI Tahun masuk 1991)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
18. Kurniawan, Ova. (1994). *Faktor-faktor Sosial yang Mempengaruhi Pengetahuan, Sikap, dan Partisipasi Politik mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UI Tahun masuk 1991)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
19. Lembar Fakta No. 8 tentang Hak Asasi Manusia. KOMNAS HAM

20. Ljunge, Martin. (2011). *Was Banfield Right? Family Ties and Civic Virtues*. University of Copenhagen and SITE.
21. McFarland, Daniel A. and Reuben J. Thomas. (2006). Bowling Young: How Youth Voluntary Associations Influence Adult Political Participation. *American Sociological Review*. American Sociological Association. Vol 71, No. 3, pp. 401-425
22. Modul 2. Hak Asasi Manusia. *Play it Fair*. Equitas Canada
23. Nugroho, Yanuar dan Adeline M. Tumenggung. (2005). *Go! Young Progressives in Southeast Asia*. Phillipines: FES.
24. Prihatiningtias, Triandi. (1993). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik pada Pemuda (Studi Kasus: FKPPi Rayon Cilandak, Jakarta Selatan)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
25. Rencana Pembelajaran Hak Asasi Manusia untuk Sekolah – sekolah Asia Tenggara, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas September 2004
26. Rush, Michael and Phillip Althoff. (1986). *Pengantar Sosiologi Politik* terj. Dra Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali.
27. Rush, Michael. (1986). *Parliament and the Public*. Harlow, Essex: Longman.
28. Saward, M. (1004). Postmodernists, Pragmatists, and the Justification of Democracy. *Economy and Society*, 23 (2): 201-16
29. Seeman, Melvin. (1959). Meaning of Alienation. *American Sociological Review*. United State of America. Vol. 24, pp 783-791
30. Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
31. Transparency International Indonesia. (2014) *Persepsi Pemilih Pemula pada Pemerintahan, Korupsi, dan Pemilu Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
32. Verba, S. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*. United State of America. (89): pp 271-294
33. Wiwoho, Laksono Hari. (2014). Antusiasme Pemilih Muda. *Litbang Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda>
34. World Values Survey. Data Analysis of Family Important in Indonesia Wave 2005-2009. United Kingdom. <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSONline.jsp>
35. World Values Survey. Data Analysis of Politic Important in Indonesia Wave 2005-2009. United Kingdom. <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSONline.jsp>



PERKUMPULAN DEMOS
Jl. Tebet Dalam 1/E No. 1A, Jakarta Selatan 12810
Tel. +62-21-8308782 Fax. +62-21-83783911
Email: office@demosindonesia.org
Website: <http://www.demosindonesia.org>
Radiostreaming : radio.demosindonesia.org
Twitter: [@demosindonesia](https://twitter.com/@demosindonesia)
Fanpage: Demos Indonesia



PAMFLET

Alamat dan Kontak
Alamat: Teras Kita, Jalan Kemang Raya
nomor. 83, Kemang, Jakarta Selatan
CP: 0857-1152-0646 (Fahmi)
Twitter : [@_pamflet](https://twitter.com/@_pamflet)
Facebook : Pamflet Generasi
Website : www.pamflet.or.id
Youtube Channel: Perkumpulan Pamflet